



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota.
9. Struktur Ruang Kota adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang Kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang Kota dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan ...

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan kota.
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega dan SWK Karees.
24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Kordon dan SWK Gedebage.
25. Kawasan ...

25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
26. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional;
28. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota (SWK);
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan ...

33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
34. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Kota.
35. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang Kota dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Kota.
36. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan atau tumpang susun (*overlay*).
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.
38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.

39. Koefisien ...

39. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/ kavling.
40. Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
41. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RTR.
42. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RDTR.
43. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RTR selain RDTR.
44. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
45. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
46. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
47. Pemangku ...

47. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat.
48. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lainnya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
50. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
51. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
52. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
53. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

55. Tempat ...

55. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
59. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
60. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS

Pasal 2

RTRWK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. berbudaya;
- e. berkelanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

BAB III
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3

- (1) RTRWK berfungsi sebagai:
 - a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; dan
 - b. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang Kota.
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan RDTR Kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota;
- d. penyusunan rencana sektoral;
- e. Pemanfaatan Ruang Kota dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; dan
- g. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih kurang 16.659 (enam belas ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Letak Geografis Daerah Kota adalah $6^{\circ} 50' 38''$ - $6^{\circ} 58' 50''$ lintang selatan dan $107^{\circ} 33' 34''$ - $107^{\circ} 43' 50''$ bujur timur.
- (3) Batas wilayah Kota terdiri atas:
 - a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
 - b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
 - c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

(4) Wilayah ...

(4) Wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) Sub Wilayah Kota, yang meliputi:

- a. SWK Bojonagara yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Sukajadi;
 3. Kecamatan Cicendo; dan
 4. Kecamatan Andir.
- b. SWK Cibeunying yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Cidadap;
 2. Kecamatan Coblong;
 3. Kecamatan Bandung Wetan;
 4. Kecamatan Sumur Bandung;
 5. Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 6. Kecamatan Cibeunying Kaler.
- c. SWK Tegalega yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Bandung Kulon;
 2. Kecamatan Babakan Ciparay;
 3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 5. Kecamatan Astana Anyar.
- d. SWK Karees yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Lengkong;
 3. Kecamatan Kiaracondong; dan
 4. Kecamatan Batununggal.
- e. SWK Arcamanik yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Mandalajati; dan
 3. Kecamatan Antapani.
- f. SWK Ujungberung yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Ujungberung;
 2. Kecamatan Cibiru;
 3. Kecamatan Cinambo; dan
 4. Kecamatan Panyileukan.
- g. SWK Kordon yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Bandung Kidul; dan
 2. Kecamatan Buahbatu.

h. SWK ...

- h. SWK Gedebage yang terdiri atas:
1. Kecamatan Gedebage; dan
 2. Kecamatan Rancasari.
- (5) SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan secara tematik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Kota yaitu mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif yang bertaraf nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota meliputi:

- a. kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang;
- b. kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Kota; dan
- c. kebijakan dan strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

Paragraf ...

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi Struktur Ruang Kota;
- b. kebijakan dan strategi Pola Ruang Kota; dan
- c. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kota.

Pasal 9

Kebijakan Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Pasal 10

Strategi untuk perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPPK;
- c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan pusat pelayanan;
- d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- e. menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- f. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Pasal 11

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Pasal 12

Strategi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dilakukan melalui strategi:

- a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
- b. mempertahankan ...

- b. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
- c. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
- d. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerja sama antar daerah;
- e. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
- f. memperluas jaringan prasarana air limbah;
- g. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
- h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
- i. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per wilayah dengan teknik yang ramah lingkungan;
- j. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- k. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
- l. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
- m. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;
- n. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
- o. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
- p. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- q. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal ...

Pasal 13

Kebijakan Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung; dan
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Pasal 14

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung khususnya di KBU;
- b. mempertahankan dan merevitalisasi Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi Kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai dan jalur rel kereta api;
- d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- e. meningkatkan ketersediaan RTH publik melalui inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur hijau jalan, pengadaan lahan untuk RTH publik, serta pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan;
- f. melestarikan dan melindungi Kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap perubahan,kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural; dan
- g. meminimalkan dampak resiko pada Kawasan rawan bencana.

Pasal ...

Pasal 15

Strategi Pola Ruang Kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan Pola Ruang Kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Wilayah Bandung Timur yang terdiri atas:
 1. SWK Arcamanik;
 2. SWK Ujungberung;
 3. SWK Kordon; dan
 4. SWK Gedebage.
- c. mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas:
 1. SWK Bojonagara;
 2. SWK Cibeunying;
 3. SWK Tegallega; dan
 4. SWK Karees.
- d. membatasi pembangunan di KBU pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya atau yang bukan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH;
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada Kawasan peruntukan lainnya; dan
- g. menata Kawasan permukiman kumuh dengan pendekatan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi.

Pasal 16

Kebijakan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif.

Pasal ...

Pasal 17

Strategi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. menjalin kemitraan Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis;
- c. mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong pengembangan kawasan yang didorong pengembangannya; dan
- d. pengembangan tata bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan efektifitas dan estetika Ruang.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 18

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat.

Pasal 19

Strategi Pemanfaatan Ruang Kota untuk pengembangan program perwujudan Tata Ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. melaksanakan Pemanfaatan Ruang Kota melalui KKPR;

b. menjabarkan ...

- b. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, sertaantisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang;
- c. mendorong kemitraan dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; dan
- d. melaksanakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dengan sektoral dalam rangka mewujudkan RTR.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 20

- (1) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten.
- (2) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan zonasi yang terintegrasi dengan RDTR sesuai arahan ketentuan umum zonasi;
- b. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan Pemanfaatan Ruang Kota dan kegiatan yang berdampak penting;
- c. mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong pembangunan yang dikembangkan dan menghambat pembangunan di wilayah yang dikendalikan;
- d. menyusun ...

- d. menyusun dan mengembangkan mekanisme untuk pelaksanaan teknik pengaturan zonasi;
- e. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- f. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Struktur Ruang Kota terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 23

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; dan
 - b. SPPK yang melayani sub wilayah kota.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PPK Alun-alun, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo; dan
 - b. PPK Gedebage, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cinambo.
- (2) PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani wilayah Bandung Barat.
- (3) PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani wilayah Bandung Timur.

Pasal 25

- (1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. SPPK Setrasari di Kecamatan Sukasari;
 - b. SPPK Pahlawan di Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - c. SPPK Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. SPPK Maleer di Kecamatan Batununggal;
 - e. SPPK Arcamanik di Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Antapani;
 - f. SPPK Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - g. SPPK Kordon di Kecamatan Bandung Kidul; dan
 - h. SPPK Derwati di Kecamatan Rancasari.

(2) SPPK ...

- (2) SPPK Setrasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani SWK Bojonagara.
- (3) SPPK Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani SWK Cibeunying.
- (4) SPPK Leuwipanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani SWK Tegallega.
- (5) SPPK Maleer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melayani SWK Karees.
- (6) SPPK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melayani SWK Arcamanik.
- (7) SPPK Ujungberung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melayani SWK Ujungberung.
- (8) SPPK Kordon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melayani SWK Kordon.
- (9) SPPK Derwati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melayani SWK Gedebage.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal ...

- c. terminal penumpang; dan
 - d. terminal barang.
- (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bandar udara pengumpul.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan arteri; dan
 - b. Jalan kolektor.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan arteri primer; dan
 - b. Jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan kolektor primer; dan
 - b. Jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. koridor 1: Jalan Cibeureum-Jalan Sudirman-Jalan Soekarno Hatta yang melintasi Terminal Leuwipanjang;
 - b. koridor 2: Jalan Rajawali Barat - Jalan Nurtanio - Jalan Abdul Rahman Saleh - Jalan Pajajaran (Simpang Abdul Rahman Saleh - Simpang Pasirkaliki) - Jalan Pasir Kaliki (Simpang Kebon Kawung - Simpang Pasteur) yang mengakses Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - c. koridor ...

- d. koridor 3: Jalan Pasteur-Dr. Djundjungan-Jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja/Jalan Layang Pasupati-Jalan Surapati, Jalan KHP Hasan Mustofa-Jalan Raya Sindanglaya-Jalan Raya Ujungberung-Jalan Raya Cipadung-Jalan Cibiru; dan
 - e. koridor 4: Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.
- (5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Asia Afrika;
 - b. Jalan Gatot Subroto;
 - c. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Terusan Jakarta-Simpang Gatot Subroto);
 - d. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Gatot Subroto-Simpang Soekarno Hatta);
 - e. Jalan Braga;
 - f. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - g. Jalan Suniaraja (Simpang Braga-Simpang Perintis Kemerdekaan);
 - h. Jalan Wastukencana;
 - i. Jalan Pajajaran (Simpang Wastukencana-Simpang Cicendo);
 - j. Jalan Cihampelas;
 - k. Jalan Abdul Rivai;
 - l. Jalan Cipaganti;
 - m. Jalan Setiabudi (Simpang Sukawangi-Simpang Cihampelas);
 - n. Jalan Setiabudi (Simpang Ciumbuleuit);
 - o. Jalan Sindang Sirna;
 - p. Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami;
 - q. Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami;
 - r. Jalan Leumah Neundeut;
 - s. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (Simpang Sutami-Simpang Leumah Neundeut);
 - t. Jalan LRE Martadinata (Simpang Wastukencana-Simpang Merdeka);
 - u. Jalan ...

- u. Jalan Pasir Kaliki (Simpang Gardujati-Simpang Kebon Kawung);
- v. Jalan Gardujati;
- w. Jalan Pahlawan;
- x. Jalan Ir. H. Juanda;
- y. Jalan Merdeka;
- z. Jalan Lembong;
- aa. Jalan Tamblong;
- bb. Jalan Oto Iskandar Dinata;
- cc. Jalan Leuwipanjang;
- dd. Jalan Kopo (Simpang BKR-Simpang Pasirkoja);
- ee. Jalan Pasirkoja;
- ff. Jalan Astana Anyar;
- gg. Jalan Sudirman;
- hh. Jalan Jamika;
- ii. Jalan Rumah Sakit;
- jj. Jalan Cinambo;
- kk. Jalan Cisaranten Kulon;
- ll. Jalan Cingised;
- mm. Jalan Cikajang Raya;
- nn. Jalan Cibatu Raya;
- oo. Jalan Kuningan Raya;
- pp. Jalan Arcamanik Endah Raya;
- qq. Jalan Pacuan Kuda;
- rr. Jalan Ciwastra;
- ss. Jalan Sunda (Simpang Lengkong Kecil-Simpang Asia Afrika);
- tt. Jalan Sadakeling;
- uu. Jalan Buahbatu (Simpang Sadakeling-Simpang BKR);
- vv. Jalan Karapitan (Simpang Cikawao/Sadakeling-Simpang Lengkong Kecil);
- ww. Jalan Jakarta;
- xx. Jalan Sukabumi;
- yy. Jalan Terusan Jakarta;
- zz. Jalan Golf Barat Raya;

aaa. Jalan ...

- aaa. Jalan Ahmad Yani (Simpang Asia Afrika-Simpang Laswi); dan
- bbb. Jalan Ahmad Yani (Simpang Supratman-Simpang Sindanglaya).
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Setiabudi;
 - b. Jalan Sukawangi;
 - c. Jalan Sukajadi;
 - d. Jalan Pasirkaliki (Simpang Pasteur-Simpang Sukajadi/Eyckman);
 - e. Jalan Pasirkaliki (Simpang Kebon Kawung-Simpang Pajajaran);
 - f. Jalan Kebon Kawung (Simpang Cicendo-Simpang Pasirkaliki);
 - g. Jalan Cicendo (Simpang Pajajaran-Simpang Kebonkawung);
 - h. Jalan Pajajaran (Simpang Pasirkaliki-Simpang Cicendo);
 - i. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranegara)
 - j. Jalan Terusan Pasir Koja (Simpang Jamika-Simpang Soekarno-Hatta);
 - k. Jalan Kopo (Simpang Jl. Peta – bts. Kota/kab. Bandung);
 - l. Jalan Moh. Toha (Simpang Jl. BKR-bts. Kota/Kab. Bandung);
 - m. Jalan Buahbatu (Simpang Pelajar Pejuang 45-Simpang Soekarno Hatta);
 - n. Jalan Terusan Buahbatu (Simpang Soekarno Hatta-Bts. Kota/Kab. Bandung);
 - o. Jalan Peta;
 - p. Jalan BKR;
 - q. Jalan Pelajar Pejuang 45;
 - r. Jalan Laswi;
 - s. Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi-Simpang Supratman);
 - t. Jalan ...

- t. Jalan W.R. Supratman;
 - u. Jalan P. Diponegoro;
 - v. Jalan Cilamaya;
 - w. Jalan Cimandiri;
 - x. Jalan Depan LAN;
 - y. Jalan Cilaki;
 - z. Jalan Gasibu Barat
 - aa. Jalan Ariaqipang;
 - bb. Jalan Sentot Alibasyah;
 - cc. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-SP3.Derwati-Batas Kota Bandung/Jbt Tol);
 - dd. Jalan Gedebage Raya;
 - ee. Jalan *Boulevard* Utama;
 - ff. Jalan *Boulevard* Barat;
 - gg. Jalan *Boulevard* Selatan;
 - hh. Jalan Cimincrang; dan
 - ii. Jalan Pusdai.
- (7) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf dd sampai dengan huruf ii merupakan usulan peningkatan jalan kota menjadi jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer.
- (8) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menghubungkan antar-SPPK terdiri atas:
- a. Jalan Ciumbuleuit (Simpang Setiabudi-Simpang Siliwangi);
 - b. Jalan Siliwangi;
 - c. Jalan Dipatiukur;
 - d. Jalan Tubagus Ismail;
 - e. Jalan Sadang Serang;
 - f. Jalan Cikutra Barat;
 - g. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri;
 - h. Jalan Pandu
 - i. Jalan Arjuna;
 - j. Jalan Kebon Jati;
 - k. Jalan Suniaraja;

1. Jalan ...

- l. Jalan LRE Martadinata (Simpang Merdeka-Simpang A. Yani)
- m. Jalan Rajawali Timur;
- n. Jalan Moh. Ramdan;
- o. Jalan Karapitan (Simpang Moh. Ramdan-Simpang Cikawao/Sadakeling);
- p. Jalan Gurame;
- q. Jalan Cikutra;
- r. Jalan H. Ibrahim Adjie (Simpang A. Yani-Simpang Terusan Jakarta); dan
- i. Jalan Brigjen Katamso.

Pasal 29

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Jalan tol Padalarang-Cileunyi;
- b. Jalan tol Soreang-Pasirkoja;
- c. Jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi (*Bandung Intra Urban Toll Road*);
- d. Jalan tol dalam kota Ujungberung- Gedebage-Majalaya (*Bandung Intra Urban Toll Road*);
- e. Jalan tol dalam kota Utara-Selatan yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung; dan
- f. Jalan tol Bandung Utara.

Pasal 30

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A;
- b. terminal penumpang tipe B; dan
- c. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. usulan terminal tipe A di Kecamatan Gedebage;
- b. terminal Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
- c. terminal Cicaheum di Kecamatan Kiaracondong.

(3) Terminal ...

- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal Ledeng di Kecamatan Cidadap;
 - b. terminal Ciroyom di Kecamatan Andir; dan
 - c. terminal Stasiun Hall di Kecamatan Andir.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal Sederhana di Kecamatan Sukajadi;
 - b. terminal Dago di Kecamatan Coblong;
 - c. terminal Sadang Serang di Kecamatan Coblong;
 - d. terminal Abdul Muis di Kecamatan Regol;
 - e. terminal Cibaduyut di Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - f. terminal Tegallega di Kecamatan Astana Anyar;
 - g. terminal Antapani di Kecamatan Antapani;
 - h. terminal Ciwastra di Kecamatan Rancasari;
 - i. terminal Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - j. terminal Margahayu di Kecamatan Buahbatu;
 - k. terminal Riung Bandung di Kecamatan Gedebage;
 - l. terminal Gedebage di Kecamatan Panyileukan;
 - m. terminal Cibiru di Kecamatan Panyileukan;
 - n. terminal Caringin di Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - o. terminal Kebon Kelapa di Kecamatan Regol; dan
 - p. terminal Kordon di Kecamatan Buahbatu.

Pasal 31

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdapat di Kecamatan Gedebage.

Pasal 32

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi jaringan jalur kereta api umum.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan kereta api jalur ganda (*double track*) Jawa Selatan yang menghubungkan Padalarang-Bandung-Banjar-Yogyakarta; dan
 - b. pembangunan kereta cepat (*high speed railway*) Jakarta-Bandung.
- (4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey (reaktivasi);
 - b. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Jatinangor;
 - c. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini;
 - d. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Soreang;
 - e. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Babakan Siliwangi;
 - f. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Gedebage-Tegalluar-Majalaya;
 - g. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya;
 - h. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Elang-Gedebage;
 - i. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Martadinata-Banjaran; dan
 - j. pembangunan kereta gantung yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Kota.

Pasal 33

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.

(2) Stasiun ...

- (2) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. stasiun Bandung di Kecamatan Cicendo;
 - b. stasiun Cimindi di Kecamatan Andir;
 - c. stasiun Ciroyom di Kecamatan Andir;
 - d. stasiun Andir di Kecamatan Andir;
 - e. stasiun Cikudapateuh di Kecamatan Batununggal;
 - f. stasiun Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong;
 - g. stasiun Cibangkong di Kecamatan Batununggal; dan
 - h. stasiun Al-Jabar di Kecamatan Gedebage.
- (3) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu stasiun Gedebage di Kecamatan Gedebage.

Pasal 34

- (1) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder.
- (2) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Husein Sastranegara di Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo.
- (3) Untuk menjaga keselamatan operasi penerbangan, ditetapkan Ketentuan Khusus pada KKOP,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Ujungberung; dan
 - b. saluran transmisi lainnya berupa saluran kabel tegangan tinggi yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.
- (5) Jaringan ...

- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jaringan saluran udara tegangan menengah yang melintasi Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Ujungberung;
 - b. jaringan saluran kabel tegangan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan;
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa gardu induk yang terdiri atas:
- a. gardu induk Bandung Utara di Kecamatan Sukasari;
 - b. gardu induk Bengkok di Kecamatan Coblong;
 - c. gardu induk Braga di Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. gardu induk Cigareleng di Kecamatan Regol;
 - e. gardu induk Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong;
 - f. gardu induk Gedebage di Kecamatan Gedebage;
 - g. gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik; dan
 - h. gardu induk Bengkok/Dago II di Kecamatan Coblong.

(7) Jaringan ...

- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembangkan melalui sistem bawah tanah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang tersebar di seluruh wilayah Kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur saluran bawah tanah;
 - b. infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. infrastruktur tiang *microcell*; dan/atau
 - d. infrastruktur menara telekomunikasi.
- (6) Ketentuan teknis dan sebaran lokasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengendalian banjir yang terdiri atas:
- a. kolam retensi Taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan;
 - b. kolam retensi Sarimas di Kecamatan Arcamanik;
 - c. kolam retensi Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;
 - d. kolam retensi Kandagapuspa di Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. kolam retensi Rancabolang di Kecamatan Gedebage;
 - f. kolam retensi Cisarupan di Kecamatan Cibiru;
 - g. kolam retensi Jalan Bima di Kecamatan Cicendo;
 - h. kolam retensi Gedebage di Kecamatan Panyileukan; dan
 - i. kolam retensi pada lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa danau buatan di Kecamatan Gedebage.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *intake* Dago bengkok di Kecamatan Coblong;
 - b. *intake* Sabuga di Kecamatan Coblong;
 - c. *intake* ...

- c. *intake* Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - d. *intake* Cipanjaluh di Kecamatan Ujungberung; dan
 - e. jaringan air baku yang melintasi Kecamatan Andir, Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracandong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Sumur Bandung.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi Pengolahan Air Badak Singa di Kecamatan Coblong;
 - b. instalasi Pengolahan Air Dago Pakar di Kecamatan Coblong;
 - c. instalasi Pengolahan Air Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - d. *miniplant* Dago Pakar di Kecamatan Coblong;
 - e. *miniplant* Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - f. *miniplant* Cipanjaluh di Kecamatan Ujungberung;
 - g. *miniplant* Cirateun di Kecamatan Cidadap; dan
 - h. jaringan produksi yang melintasi seluruh kecamatan.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan distribusi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah berupa IPAL Bojongsoang yang berada di Kabupaten Bandung dengan jaringan pipa pelayanan melintasi Kecamatan Andir, Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batunuggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Regol; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah berupa IPAL komunal meliputi IPAL Cipamokolan di Kecamatan Rancasari, IPAL Ujungberung di Kecamatan Ujungberung, serta IPAL komunal lainnya.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di setiap kelurahan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA di Kecamatan Gedebage.

(4) TPST ...

- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. TPST skala wilayah di setiap SWK; dan
 - b. TPST skala kota masing-masing pada Wilayah Bandung Timur dan Wilayah Bandung Barat.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kajian kesesuaian lahan serta daya dukung lingkungan.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Soekarno Hatta;
 - b. Jalan Peta;
 - c. Jalan Pelajar Pejuang 45;
 - d. Jalan BKR;
 - e. Jalan Pasirkoja;
 - f. Jalan Terusan Pasirkoja;
 - g. Jalan Gedebage;
 - h. Jalan Cimencrang;
 - i. Jalan Tol Dalam Kota;
 - j. Jalan Sejajar Tol;
 - k. Jalan Tol Purbaleunyi;
 - l. Jalan Ir. H. Juanda;
 - m. Jalan Siliwangi;
 - n. Jalan Cisititu;
 - o. Jalan Ciumbuleuit;
 - p. Jalan Setiabudhi;
 - q. Jalan Dipatiukur;
 - r. Jalan P.H.H Mustofa;
 - s. Jalan A.H Nasution;
 - t. Jalan layang Pasupati;
 - u. Jalan ...

- u. Jalan Dr. Djundjunan;
- v. Jalan Cihampelas;
- w. Jalan Sukanegara;
- x. Jalan Cikapayang;
- y. Jalan Asia Afrika;
- z. Jalan Braga;
- aa. Jalan Buahbatu;
- bb. Jalan Terusan Buahbatu;
- cc. Jalan Dipatiukur;
- dd. Jalan Gatot Subroto;
- ee. Jalan Golf Barat Raya;
- ff. Jalan Pasirkaliki;
- gg. Jalan Ibrahim Adjie;
- hh. Jalan Jakarta;
- ii. Jalan Jamika;
- jj. Jalan Ahmad Yani;
- kk. Jalan Jenderal Sudirman;
- ll. Jalan Raya Cibeureum
- mm. Jalan Kesehatan;
- nn. Jalan Laskar Wanita Indonesia;
- oo. Jalan Layang Antapani;
- pp. Jalan Mochammad Toha;
- qq. Jalan Otto Iskandar Dinata;
- rr. Jalan Prabudimuntur;
- ss. Jalan Cibiru-Cileunyi;
- tt. Jalan Raya Kopo;
- uu. Jalan Sukabumi;
- vv. Jalan Sukajadi;
- ww. Jalan Surapati; dan
- xx. Jalan Terusan Jakarta.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Taman Tegallega di Kecamatan Regol;
- b. Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kecamatan Gedebage;
- c. Taman Gasibu di Kecamatan Bandung Wetan;
- d. alun-alun kota di Kecamatan Regol;

e. Sasana ...

- e. Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Coblong;
- f. lapangan olah raga Arcamanik di Kecamatan Arcamanik; dan
- g. lapangan olah raga dan taman kota lainnya.

Pasal 43

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sungai Cibeureum;
 - b. Sungai Cikapundung;
 - c. Sungai Cipamokolan;
 - d. Sungai Cidurian;
 - e. Sungai Cicadas;
 - f. Sungai Citepus;
 - g. Sungai Cisaranten;
 - h. Sungai Cinambo;
 - i. Sungai Cibeunying;
 - j. Sungai Ciparay;
 - k. Sungai Cirangrang;
 - l. Sungai Cibodas;
 - m. Sungai Cibogo;
 - n. Sungai Cigondewah;
 - o. Sungai Cijalupang;
 - p. Sungai Cikadu;
 - q. Sungai Cikakak;
 - r. Sungai Cikalintu;
 - s. Sungai Cikapayang;
 - t. Sungai Cikendal;
 - u. Sungai Cikeueus;
 - v. Sungai Cikiley;
 - w. Sungai Cipaganti;
 - x. Sungai Cipanjal;
 - y. Sungai Ciroyom; dan
 - z. Sungai Citarum.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam RDTR dan dikembangkan secara terintegrasi.

BAB VI RENCANA POLA RUANG KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Rencana Pola Ruang Kota terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 45

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH; dan
- d. kawasan konservasi.

Pasal 46

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a seluas lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal ...

Pasal 47

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b seluas lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi:

- a. kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai pada Sungai Cikapundung, Sungai Cikadu, Sungai Ciregol, Sungai Cidurian, Sungai Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo dan Sungai Cipanjaluh;
- b. kawasan kearifan lokal berupa kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.

Pasal 48

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, tersebar diseluruh wilayah kota yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah Daerah Kota dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. RTH Publik dengan total luas paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat dengan total luas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) RTH eksisting seluas lebih kurang 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar terdiri atas:
 - a. rimba kota (RTH-1);
 - b. taman kota (RTH-2);
 - c. taman kecamatan (RTH-3);
 - d. pemakaman (RTH-7); dan
 - e. jalur hijau (RTH-8).
- (3) Rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. hutan kota Babakan Siliwangi di Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Coblong;
 - b. taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan;
 - c. taman Kandaga Puspa di Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. taman Pet Park di Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. taman Maluku di Kecamatan Bandung Wetan;

f. eks ...

- f. eks TPA Pasir Impun di Kecamatan Mandalajati;
 - g. eks TPA Cicabe di Kecamatan Mandalajati;
 - h. Kebun Binatang Bandung di Kecamatan Coblong;
 - i. taman Kehati di Kecamatan Cibiru; dan
 - j. rimba kota lainnya yang tersebar di Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cibeunying Kaler.
- (4) Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas lebih kurang 118 (seratus delapan belas) hektar, meliputi:
- a. taman Alun-alun Bandung di Kecamatan Regol;
 - b. taman Tegallega di Kecamatan Regol;
 - c. taman Cibeunying di Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. taman Sukajadi di Kecamatan Sukajadi;
 - e. Taman Lalulintas di Kecamatan Sumur Bandung;
 - f. taman Pramuka di Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. taman Panatayuda di Kecamatan Coblong;
 - h. taman Alun-alun Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - i. taman Alun-alun Cicendo di Kecamatan Cicendo; dan
 - j. Taman kota di Kecamatan Gedebage.
- (5) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas lebih kurang 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kota.
- (6) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas lebih kurang 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. TPU Cibarunay di Kecamatan Sukasari;
 - b. TPU Pandu di Kecamatan Cicendo;
 - c. TPU Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;
 - d. TPU Astana Anyar di Kecamatan Astana Anyar;
 - e. TPU Babakan Ciparay di Kecamatan Babakan Ciparay;
 - f. TPU Cikutra di Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - g. TPU Cikadut di Kecamatan Mandalajati;
 - h. TPU Nagrok di Kecamatan Ujungberung;

i. TPU ...

- i. TPU Maleer/Cibangkong di Kecamatan Batununggal;
 - j. TPU Gumuruh di Kecamatan Batununggal;
 - k. TPU Rancacili di Kecamatan Rancasari;
 - l. TPU Legok Cisureuh di Kecamatan Regol;
 - m. TPU Ciburuy di Kecamatan Cinambo; dan
 - n. TPU lainnya.
- (7) Jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hektar, tersebar di:
- a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Antapani;
 - c. Kecamatan Arcamanik;
 - d. Kecamatan Astana Anyar;
 - e. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - f. Kecamatan Bandung Kidul;
 - g. Kecamatan Bandung Kulon;
 - h. Kecamatan Bandung Wetan;
 - i. Kecamatan Batununggal;
 - j. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - k. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - l. Kecamatan Buahbatu;
 - m. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - n. Kecamatan Cicendo;
 - o. Kecamatan Cidadap;
 - p. Kecamatan Cinambo;
 - q. Kecamatan Coblong;
 - r. Kecamatan Gedebage;
 - s. Kecamatan Kiaracondong;
 - t. Kecamatan Lengkong;
 - u. Kecamatan Panyileukan;
 - v. Kecamatan Rancasari;
 - w. Kecamatan Regol;
 - x. Kecamatan Sukajadi;
 - y. Kecamatan Sukasari; dan
 - z. Kecamatan Sumur Bandung.
- (8) Penyediaan RTH publik dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 - b. pemulihan kembali ruang terbuka;
 - c. penyerahan PSU perumahan;

d. inventarisasi ...

- d. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. kontribusi penyediaan lahan untuk pemakaman dari pengembang perumahan;
 - f. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 - g. pengembangan perumahan vertikal dan kawasan campuran dengan penyediaan RTH;
 - h. penataan kawasan sempadan sungai;
 - i. pengembangan jalur hijau jalan; dan
 - j. pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan/gedung.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Taman Hutan Raya.
- (3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda seluas 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) hektar di Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cidadap.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 50

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan ...

- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan pertanian;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi areal seluas lebih kurang 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kawasan RTNH; dan
 - d. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 10.153 (sepuluh ribu seratus lima puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi areal seluas lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kawasan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, serta fasilitas olah raga;
- (5) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Coblong.
- (6) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan TPA di Kecamatan Gedebage;
 - b. kawasan gardu induk Bandung Utara di Kecamatan Sukasari;
 - c. kawasan gardu induk Bengkok dan gardu induk Dago II di Kecamatan Coblong;
 - d. kawasan ...

- d. kawasan gardu induk Cigereleng di Kecamatan Regol dan Kecamatan Bandung Kidul;
- e. kawasan gardu induk Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong;
- f. kawasan gardu induk Gedebage di Kecamatan Gedebage;
- g. kawasan gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik; dan
- h. kawasan gardu induk Braga di Kecamatan Sumur Bandung.

Pasal 52

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b seluas lebih kurang 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) hektar, tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sektor jasa;
 - b. pengembangan sektor perdagangan; dan
 - c. penyediaan ruang untuk sektor informal.

Pasal 53

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, seluas lebih kurang 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di:

- a. Kecamatan Andir;
- b. Kecamatan Arcamanik;
- c. Kecamatan Astana Anyar;
- d. Kecamatan Babakan Ciparay;
- e. Kecamatan Bandung Kulon;
- f. Kecamatan Bandung Wetan;
- g. Kecamatan Batununggal;
- h. Kecamatan Bojongloa Kidul;
- i. Kecamatan Buahbatu;
- j. Kecamatan Cibeunying Kaler;
- k. Kecamatan Cibeunying Kidul;
- l. Kecamatan Cicendo;
- m. Kecamatan Cinambo;
- n. Kecamatan Coblong;
- o. Kecamatan ...

- o. Kecamatan Gedebage;
- p. Kecamatan Kiaracondong;
- q. Kecamatan Mandalajati;
- r. Kecamatan Rancasari;
- s. Kecamatan Regol;
- t. Kecamatan Sukasari;
- u. Kecamatan Sumur Bandung; dan
- v. Kecamatan Ujungberung.

Pasal 54

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d seluas lebih kurang 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektar tersebar di:
- a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Arcamanik;
 - c. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - d. Kecamatan Bandung Kidul;
 - e. Kecamatan Bandung Kulon;
 - f. Kecamatan Batununggal;
 - g. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - h. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - i. Kecamatan Buahbatu;
 - j. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - k. Kecamatan Cicendo;
 - l. Kecamatan Cinambo;
 - m. Kecamatan Gedebage;
 - n. Kecamatan Kiaracondong;
 - o. Kecamatan Mandalajati;
 - p. Kecamatan Panyileukan;
 - q. Kecamatan Regol; dan
 - r. Kecamatan Ujungberung.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan industri non polutan dan pergudangan yang terdiri atas:
- a. industri kecil dan menengah;
 - b. sentra industri; dan
 - c. pergudangan.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan industri kecil dan menengah serta pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c terdiri atas:
- a. mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
 - b. mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Ujungberung, Cibiru dan Gedebage; dan
 - c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai dan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses ke terminal peti kemas Gedebage.
- (4) Rencana pengembangan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. penetapan dan pengembangan industri rumah yang meliputi:
 1. sentra industri kaos Surapati;
 2. sentra industri pakaian Cigondewah;
 3. sentra industri boneka Sukamulya;
 4. sentra industri rajut Binongjati;
 5. sentra industri sepatu dan olahan kulit Cibaduyut;
 6. sentra industri tahu dan tempe Cibuntu; dan
 7. sentra industri potensial lain yang dikembangkan.
 - b. pengembangan fasilitas Kota yang menunjang kegiatan sentra industri kecil; dan
 - c. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah menjadi bagian dari sentra industri kecil.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan sentra industri potensial lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cidadap.

Pasal 56

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi kawasan tanaman pangan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar tersebar di:
 - a. Kecamatan Cibiru;
 - b. Kecamatan Cidadap; dan
 - c. Kecamatan Ujungberung.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, ditetapkan KP2B seluas lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar, tersebar di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru.
- (4) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus terkait KP2B.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hektar di beberapa kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Batununggal;
 - c. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. Kecamatan Cicendo;
 - e. Kecamatan ...

- e. Kecamatan Cinambo;
 - f. Kecamatan Gedebage;
 - g. Kecamatan Kiaracondong;
 - h. Kecamatan Panyileukan;
 - i. Kecamatan Sukajadi; dan
 - j. Kecamatan Coblong.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h akan dikembangkan menjadi kawasan berorientasi transit
- (3) Pengembangan kawasan berorientasi transit akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h seluas lebih kurang 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:

- a. Lanud Husein Sastranegara;
- b. Kodam III/Siliwangi;
- c. Kodim 0618/BS;
- d. Den Interdam;
- e. Topdam;
- f. Kudam;
- g. Babinminvetcaddam;
- h. Jasda;
- i. Binaldam;
- j. Kumdam;
- k. Paldam;
- l. Gudpalrah A.01;
- m. Rindam;
- n. Ajendam;
- o. Satsikmil Tipe B;
- p. Pomdam;
- q. Kesdam;
- r. Denkeslap 03.03.01;
- s. Zidam;
- t. Hubdam;
- u. Bekangdam;

v. Den Ang III-44-13...

- v. Den Ang III-44-13;
- w. Yon Arh-3;
- x. Yon Kav-4/Tank;
- y. Gupusmu I Ditpalad;
- z. Ku Pus II Ditkuad;
- aa. Kodiklat TNI AD;
- bb. Pussenif;
- cc. Pusedikku;
- dd. Pusedikkum;
- ee. Secapa AD;
- ff. SESKOAD;
- gg. SESKO TNI;
- hh. Dislitbang AD;
- ii. Dispsi AD;
- jj. Coklit Ditkuad;
- kk. Ditajenad;
- ll. Lafi AD DIskesad;
- mm. Lanal Bandung;
- nn. Denmadam;
- oo. Bengrah A.01;
- pp. Rumkit TK. IV 03.07.02;
- qq. Disjarah;
- rr. Gudkesrah 03.02.01;
- ss. Pusen Kav;
- tt. Pusenpur; dan
- uu. Mess Angkatan Laut.

BAB VII KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis di Kota Bandung meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kota (KSK).
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) KSP ...

- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSP Bandung Utara yang memiliki sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang berada di sebelah Utara garis kontur 750 mdpl.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PPK Alun-alun;
 - b. PPK Gedebage;
 - c. Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;
 - d. Sentra Boneka Sukamulya;
 - e. Sentra Rajut Binongjati;
 - f. Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah;
 - g. Sentra Kaos Surapati;
 - h. Sentra *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas;
 - i. Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu;
 - j. Kawasan Babakan Siliwangi;
 - k. Kawasan Punclut; dan
 - l. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
KSK PPK Alun-alun

Pasal 60

- (1) KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Batas ...

- (2) Batas-batas KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran dan Jalan Kebonjati;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasirkoja dan Jalan Abdul Muis;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tamblong dan Jalan Lengkong Besar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Astana Anyar.
- (3) Pengembangan KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan kota yang terpadu dengan upaya pelestarian bangunan cagar budaya;
- (4) Arah pengembangan KSK PPK Alun-alun meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan Alun-alun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota yang terpadu;
 - b. mengembangkan kawasan stasiun Bandung sebagai kawasan berorientasi transit berskala kota; dan
 - c. melestarikan bangunan cagar budaya yang berada di dalam kawasan.

Bagian Kedua
KSK PPK Gedebage

Pasal 61

- (1) KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas KSK PPK Gedebage terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi;

c. sebelah ...

- c. sebelah Timur berbatasan dengan batas Jalan Cimencrang, Jalur Kereta Api Padalarang-Cicalengka dan Jalan Bhayangkara yang merupakan batas Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gedebage.
- (3) Pengembangan KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kawasan Gedebage sebagai pusat pelayanan kota di wilayah Bandung Timur yang terpadu, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (4) Arah pengembangan KSK PPK Gedebage meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas olah raga, fasilitas transportasi, fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan dan fasilitas sosial lainnya berskala kota;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi; dan
 - c. mengembangkan kawasan PPK Gedebage sebagai kawasan berorientasi transit berskala kota yang terpadu dengan simpul transportasi angkutan massal.

Bagian Ketiga

KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut

Pasal 62

- (1) KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut adalah koridor Jalan Cibaduyut dan sekitarnya, mulai dari persimpangan Jalan Soekarno-Hatta sampai Komplek stasiun televisi Republik Indonesia.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan kawasan sentra industri sepatu dan olah kulit yang maju dan berdaya saing tinggi.
- (4) Arah pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri dan perdagangan sepatu dan industri kulit; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif kota.

Bagian Keempat

KSK Sentra Boneka Sukamulya

Pasal 63

- (1) KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) KSK Sentra Boneka Sukamulya terletak di Kecamatan Sukajadi.
- (3) Batas KSK Sentra Boneka Sukamulya terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prof. Dr. Sutami;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dr. Junjuran;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sukamulya Indah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Surya Sumantri.
- (4) Pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan sentra industri boneka yang maju dan berdaya saing.

(5) Arah ...

- (5) Arah pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri boneka; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima
KSK Sentra Rajut Binongjati

Pasal 64

- (1) KSK Sentra Rajut Binongjati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas Kawasan Strategis Sentra Rajut Binongjati terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Soekarno- Hatta;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan H. Ibrahim Adjie; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Cikapundung.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan sentra industri rajut yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri rajut; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...

Bagian Keenam
KSK Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah

Pasal 65

- (1) KSK sentra tekstil dan pakaian Cigondewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf f yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK sentra Tekstil dan pakaian Cigondewah terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Holis;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ci Cukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cigondewah Rahayu dan Jalan Cibolerang Barat.
- (3) Pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian Cigondewah bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri pakaian dan sentra perdagangan yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian Cigondewah meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung untuk mewujudkan pengembangan kawasan sebagai sentra industri pakaian dan sentra perdagangan tekstil; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang nyaman dan aman.

Bagian Ketujuh
KSK Sentra Kaos Surapati

Pasal 66

- (1) KSK sentra kaos Surapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf g, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Lokasi ...

- (2) Lokasi KSK sentra kaos Surapati adalah koridor Jalan Surapati dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Gagak sampai persimpangan Jalan Pahlawan.
- (3) Pengembangan KSK sentra kaos Surapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Surapati sebagai kawasan sentra industri kaos yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan ke arah dalam pada lapis kedua dan ketiga dari jaringan jalan utama; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi kreatif yang aman dan nyaman.

Bagian Kedelapan KSK Cihampelas

Pasal 67

- (1) KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf h, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas adalah koridor Jalan Cihampelas dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Lamping sampai persimpangan Jalan Layang Pasupati.
- (3) Pengembangan KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Cihampelas sebagai kawasan sentra perdagangan *jeans* dan pakaian yang maju dan berdaya saing serta pengendalian tata ruang yang efektif.
- (4) Arah pengembangan KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung, seperti penyediaan fasilitas parkir terpadu, penyediaan fasilitas untuk sektor informal dan lain sebagainya;
 - b. mengendalikan ...

- b. mengendalikan pengembangan kawasan yang mengganggu fungsi kawasan dan pergerakan lalu lintas; dan
- c. penataan kawasan untuk mendukung berfungsinya sentra perdagangan jeans dan fashion yang aman dan nyaman.

Bagian Kesembilan

KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu

Pasal 68

- (1) KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf i, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Bojong Raya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Pasirkoja;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Holis; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cijerah Raya.
- (4) Pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri tahu dan tempe yang maju dan berdaya saing.
- (5) Arah pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri tahu dan tempe yang berdaya saing; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
KSK Babakan Siliwangi

Pasal 69

- (1) KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf j, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Batas KSK Babakan Siliwangi terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Taman Hewan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Taman Sari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikapundung.
- (3) Pengembangan KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Babakan Siliwangi sebagai paru-paru kota dan pelestarian lingkungan.
- (4) Arah pengembangan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan hutan kota Babakan Siliwangi dan kawasan kebun binatang Bandung sebagai kawasan rekreasi alam yang aman, nyaman, serta mempertahankan pelestarian lingkungan; dan
 - b. meningkatkan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan rekreasi di kawasan kebun binatang untuk mewujudkan kawasan yang aman dan nyaman.

Bagian ...

Bagian Kesebelas
KSK Punclut

Pasal 70

- (1) KSK Punclut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf k, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan.
- (2) Batas KSK Punclut terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan batas administratif kota;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cikapundung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan batas administratif kota; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan batas administratif kota dan Sungai Cipaganti.
- (3) Pengembangan KSK Punclut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengendalikan pengembangan kawasan Punclut untuk mewujudkan pelestarian dan daya dukung lingkungan.
- (4) Arah pengembangan KSK Punclut meliputi:
 - a. membatasi secara ketat pengembangan terbangun di kawasan yang memiliki kelerengan tinggi; dan
 - b. mengembangkan kawasan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keduabelas
KSK Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 71

- (1) KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf l, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial-budaya.

(2) KSK ...

- (2) KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
- a. Kelurahan Cempaka, Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Dungus Cariang, Kelurahan Maleber dan Kelurahan Kebon Jeruk di Kecamatan Andir;
 - b. Kelurahan Sukabungah di Kecamatan Sukajadi;
 - c. Kelurahan Sukapada di Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - d. Kelurahan Hegarmanah di Kecamatan Cidadap;
 - e. Kelurahan Rancabolang di Kecamatan Gedebage;
 - f. Kelurahan Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
 - g. Kelurahan Cibangkong di Kecamatan Batununggal;
 - h. Kelurahan Kebon Jayanti di Kecamatan Kiaracondong;
 - i. Kelurahan Kujangsari di Kecamatan Bandung Kidul;
 - j. Kelurahan Cijaura di Kecamatan Buahbatu;
 - k. Kelurahan Babakan Ciparay dan Kelurahan Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay;
 - l. Kelurahan Cijerah, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondewah Rahayu dan Kelurahan Warung Muncang di Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Kelurahan Kopo di Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - n. lokasi Sadang Serang, Simpang Dago dan Bagus Rangin di Kecamatan Coblong;
 - o. lokasi Arjuna dan Jatayu Molek di Kecamatan Cicendo;
 - p. lokasi Tamansari di Kecamatan Bandung Wetan;
 - q. lokasi Nyengseret di Kecamatan Astana Anyar; dan
 - r. lokasi Cingised di Kecamatan Arcamanik.
- (3) Pengembangan KSK penanganan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pengurangan kawasan kumuh.

(4) Arah ...

- (4) Arah pengembangan KSK penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas permukiman pada kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - b. penataan kembali kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan RTH; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan perumahan vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Arahan Pemanfaatan Ruang Kota terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 73

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 74

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama, yaitu tahun 2022-2024;
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua, yaitu tahun 2025-2029;
- c. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
- d. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
- e. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kelima, yaitu tahun 2040-2042.

Pasal 75

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Perwujudan ...

- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 76

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.

(3) Indikasi ...

- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan PPK;
 - b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala Kota di PPK;
 - d. pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage guna mendukung PPK Gedebage sebagai pusat aktivitas kota;
 - e. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan SPPK;
 - f. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - g. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.

(2) Perwujudan ...

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
- c. peningkatan fungsi dan status jalan kota menjadi jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- e. pembangunan jalan tol dalam kota Utara-Selatan yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan dengan jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung;
- f. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang, meliputi:
 1. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang susun jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;

11. perlintasan ...

11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- g. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman-Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan KH Hasysim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun atau perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada
- h. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- i. pengajuan usulan pembangunan Terminal Tipe A di Gedebage;
- j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
- k. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
- l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
- o. pengembangan ...

- o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - p. pengembangan aplikasi sistem transportasi terpadu;
 - q. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - r. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - s. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - t. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - v. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - w. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - x. reaktivitasi jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pengembangan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...

- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis;
- (6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan ...

6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. revitalisasi SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pengembangan IPAL komunal di Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi lainnya sesuai kebutuhan;
 4. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah yang sudah terlayani; dan
 5. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem. jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pembangunan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan ...

3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. peningkatan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
- b. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
 4. pengembangan taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;

6. pemanfaatan ...

6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan PSU perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
 3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
 4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
 5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
 6. pembatasan ...

6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pembangunan rumah sakit tipe A;
13. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
14. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
15. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
16. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
17. pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
18. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
19. pemeliharaan dan peningkatan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
20. pemeliharaan ...

20. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pembangunan kembali kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. peningkatan pengembangan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
 8. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 9. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 10. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan ...

2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra-sentra industri kecil;
 3. penataann kawasan pada sentra-sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. penyusunan panduan pelestarian kawasan dan bangunan;
 3. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 4. penataan pedagang kaki lima;
 5. pengembangan RTH;
 6. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 7. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 3. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
4. pembangunan ...

4. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 5. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi;
 6. pengembangan fasilitas olah raga berskala kota;
 7. pengembangan danau buatan; dan
 8. pembangunan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan ...

2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penataan kawasan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha;
 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 3. penataan pedagang kaki lima;
 4. penataan fasad bangunan;
 5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. konsolidasi lahan komersial dan perumahan.
- i. Perwujudan ...

- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 - 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 - 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 - 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 - 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 - 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
 - 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 - 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 - 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
- l. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 - 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 - 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
 - 3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
 - 4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal ...

Pasal 78

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrasatruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan ...

- c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjungan -Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang:
 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjungan-jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan ...

9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- g. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman – Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi – Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan KH Hasyim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun atau perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada.
- h. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- i. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan St. Hall;
- j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
- k. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- l. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- m. pengembangan ...

- m. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
 - n. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - o. pengembangan aplikasi sistem transportasi terpadu;
 - p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - w. reaktivasi jalur kereta api Kiaracondong – Ciwidey;
 - x. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - y. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...

- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.
- (6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
6. penambahan ...

6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pengembangan IPAL komunal di Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi lainnya sesuai kebutuhan;
 4. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 5. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pembangunan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan ...

3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman-taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman-taman kecamatan;

4. pengembangan ...

4. pengembangan taman-taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
 6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan PSU perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan/gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
 3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
 4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
 5. mempertahankan ...

5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pembangunan rumah sakit tipe A;
13. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
14. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
15. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
16. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
17. pengembangan ...

17. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 18. pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka non-hijau;
 19. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 20. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracandong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
 8. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 9. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 10. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perwujudan ...

- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 - 2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 - 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 - 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 - 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 - 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 - 5. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 - 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 - 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 - 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - 1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 - 2. pengembangan lahan sawah abadi.

g. perwujudan ...

- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) yang terintegrasi.
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. pengembangan RTH;
 4. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 5. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 4. pembangunan ...

4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 4. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 5. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 6. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 4. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 5. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. penataan ...

3. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 4. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
 2. penataan kawasan;
 3. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 3. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha
 4. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 5. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra *jeans* dan *fashion* Cihampelas meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 3. penataan pedagang kaki lima;
 4. penataan fasad bangunan;
 5. pembangunan ...

5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. konsolidasi lahan komersial dan perumahan perumahan.
- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
 - j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
 - k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
 - l. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;

3. penataan ...

3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 80

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem infrasatruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan ...

- c. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - d. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - e. pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK/ SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjungan-Ujungberung-Cileunyi, jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan jalan tol Bandung Utara; dan
 - g. pembangunan simpang susun tidak sebidang dan perlintasan tidak sebidang:
 - 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 - 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Moch. Toha;
 - 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Buahbatu;
 - 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 - 5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 - 6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 - 7. simpang ...

7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio – rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. perlintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- h. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman-Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan KH Hasysim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun/perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada.
- i. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- j. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
- k. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe C di seluruh Kota;
- l. pengembangan ...

- l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
- o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
- p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang
- q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
- r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
- s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
- t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
- u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
- v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
- w. pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
 - 1. jalur Leuwipanjang-Jatinangor;
 - 2. jalur Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini;
 - 3. jalur Leuwipanjang-Soreang;
 - 4. jalur Babakan Siliwangi-Leuwipanjang;
 - 5. jalur Cimindi-Gedebage-Tegalluar-Majalaya; dan
 - 6. jalur Babakan Siliwangi -Maribaya.
- x. pembangunan jalur kereta gantung yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Kota;
- y. peningkatan ...

- y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.
- (6) Perwujudan ...

(6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. Perwujudan SPAL, meliputi:
 1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan dan Ujungberung;
 4. pengembangan IPAL komunal pada lokasi yang dibutuhkan sesuai daya dukung lingkungan;
 5. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 6. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan ...

2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pengembangan dan peningkatan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.

- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
 4. pengembangan taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
 6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
 - c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan ...

2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pengembangan ...

12. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
 13. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
 14. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) yang terintegrasi;
 15. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
 16. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 17. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
 18. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 19. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracandong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengendalian ...

7. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 8. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 9. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan ...

- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
 - f. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
 1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
 - g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. pengembangan RTH;
 4. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 5. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan ...

- b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 - 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 - 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 - 4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 - 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 - 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 - 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 - 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 - 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan ...

- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 - 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
 - 1. penataan kawasan;
 - 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - 3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 - 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
 - 1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 - 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha;
 - 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
 - 1. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 - 2. penataan ...

2. penataan pedagang kaki lima;
 3. penataan fasad bangunan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. konsolidasi lahan komersial dan peremajaan perumahan.
- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
1. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 82

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan ...

- b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjuran-Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan jalan tol Bandung Utara;
 - g. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang:
 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun Jalan Gedebage – jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang ...

6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi – Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran – Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjungan – Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna – rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh – rel kereta api;
 12. perlintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani – rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda – rel kereta api perlintasan tidak sebidang Jalan Braga – rel kereta api; dan
 14. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- h. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang yang telah ada;
 - i. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
 - j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
 - k. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
 - l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
 - m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
 - o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - p. penerapan ...

- p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - w. pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
 1. jalur Leuwipanjang–Jatinangor;
 2. jalur Leuwipanjang–Cimahi–Padalarang–Walini;
 3. jalur Leuwipanjang–Soreang;
 4. jalur Babakan Siliwangi–Leuwipanjang;
 5. jalur Cimindi–Gedebage–Tegalluar–Majalaya; dan
 6. jalur Babakan Siliwangi–Maribaya.
 - x. pembangunan jalur kereta gantung yang menghubungkan Utara–Selatan dan Timur–Barat wilayah Kota;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan ...

- c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem saluran bawah tanah bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.
- (6) Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 - 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 - 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 - 3. pemeliharaan ...

3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan dan Ujungberung;
 4. pengembangan dan pembangunan IPAL komunal lainnya sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan
 5. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 6. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem. jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pemeliharaan ...

4. pemeliharaan dan pengembangan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase.
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. pemantapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. Perwujudan ...

- b. perwujudan RTH, meliputi:
1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
 4. pengembangan taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
 6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
 3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;

4. pengendalian ...

4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
13. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
14. pengembangan ...

14. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
 15. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
 16. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 17. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
 18. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 19. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracandong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 6. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 7. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan ...

2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peningkatan kualitas penataan kawasan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 4. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
 - c. perwujudan ...

- c. perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penataan kawasan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;

3. pengembangan ...

3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha
 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
1. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. penataan fasad bangunan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. konsolidasi lahan komersial dan perumahan.
- i. perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. perwujudan ...

- j. perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 - 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 - 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 - 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 - 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. perwujudan KSK Punclut meliputi:
 - 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 - 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 - 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
- 1. perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 - 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 - 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
 - 3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
 - 4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 84

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK

(3) Sinkronisasi ...

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 85

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA WILAYAH KOTA

Pasal 86

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang Kota;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota di setiap Kawasan Kota; dan
 - d. Dasar pemberian KKPR.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Kota

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, RTH, RTNH, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan/atau regional;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan dilengkapi prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan ...

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota perdagangan dan jasa;
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. fasilitas peribadatan berupa masjid raya dan fasilitas peribadatan lainnya dengan skala pelayanan kota dan/atau regional;
 - 2. fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi dan perpustakaan;
 - 3. fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum kelas A;
 - 4. bina sosial berupa gedung pertemuan umum;
 - 5. fasilitas olah raga atau rekreasi berupa kompleks olah raga dengan gelanggang olah raga, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional dan sejenisnya;
 - 6. fasilitas pemerintahan berupa kantor pemerintahan, kantor telekomunikasi wilayah, kantor polisi, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
 - 7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat perbelanjaan utama, pasar, pertokoan dan sejenisnya; dan
 - 8. fasilitas transportasi berupa terminal, stasiun kereta api dan parkir umum.
- f. Pada kawasan pusat pelayanan kota dapat dikembangkan kawasan berorientasi transit skala kota sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, RTH, RTNH pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan/atau SWK;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan dilengkapi prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi sub pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota perdagangan dan jasa;
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. fasilitas pendidikan tinggi dan perpustakaan;
 2. fasilitas kesehatan rumah sakit tipe C;
 3. fasilitas peribadatan berupa masjid dan tempat ibadah lainnya;
 4. fasilitas bina sosial berupa gedung serba guna dan sejenisnya;
 5. fasilitas olah raga/rekreasi berupa stadion mini, gedung pertunjukan, taman kota dan sejenisnya;
 6. fasilitas ...

6. fasilitas perkantoran, berupa kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA), pemadam kebakaran dan sebagainya;
 7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya; dan
 8. fasilitas transportasi berupa terminal, pangkalan umum dan parkir umum.
- f. Pada kawasan SPPK dapat dikembangkan kawasan berorientasi transit skala sub-kota; dan
 - g. Berorientasi transit skala subkota.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi terminal barang;
 - e. ketentuan umum zonasi sekitar jalur kereta api; dan
 - f. ketentuan umum zonasi bandar udara pengumpul.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. ruang milik jalan;
 2. ruang manfaat jalan; dan
 3. ruang pengawasan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang Kota di sepanjang jalan arteri dan kolektor primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan ...

2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman pohon, pembangunan utilitas kota (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola Ruang Kota;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian;
 2. perkebunan;
 3. kawasan perlindungan setempat; dan
 4. kegiatan operasional penunjang jalan tol.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. industri;
 4. pariwisata;
 5. perkantoran; dan
 6. transportasi dengan syarat pembatasan jarak daerah terbangun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan tol;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola Ruang Kota; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal adalah jembatan penyebrangan orang.

(4) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan untuk fasilitas utama; dan
 2. fasilitas penunjang kegiatan terminal penumpang.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perkantoran, perdagangan dan jasa;
 2. fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan terminal; dan
 3. jaringan utilitas kota dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran kegiatan terminal dan penumpang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan penumpang dan terminal;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengacu pada ketentuan intensitas kawasan transportasi; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk mendukung optimalisasi fungsi terminal penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket; dan
 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang cacat, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, toilet umum.
- (5) Ketentuan umum zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota terminal barang mengacu pada intensitas kawasan transportasi; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mewujudkan optimalisasi kawasan meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa:
 - a) jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang;
 - b) jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir angkutan barang;
 - c) bangunan kantor terminal;
 - d) menara pengawasa;
 - e) rambu; dan
 - f) papan informasi.
 - 2. fasilitas penunjang berupa:
 - a) kamar kecil/toilet;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kios/kantin;
 - d) ruang/fasilitas pengobatan;
 - e) ruang informasi dan pengaduan;
 - f) alat pemadam kebakaran;
 - g) tempat pengumpulan sampah; dan
 - h) taman.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang Kota manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sebagai berikut:
 - 1. garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan kereta api berbentuk lurus;
 - 2. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - 3. garis sempadan jalan kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - 4. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;
 - 5. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
 - 6. garis ...

6. garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m; dan
 7. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mendukung optimalisasi kawasan terdiri atas:
1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api;
 3. fasilitas pengoperasian kereta api;
 4. komponen jalan rel:
 - a) rel;
 - b) wesel;
 - c) penambat;
 - d) bantalan;
 - e) balas;
 - f) subbalas; dan
 - g) *subgrade*.
 5. peralatan persinyalan kereta api;
 6. peralatan telekomunikasi; dan
 7. instalasi listrik.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang Kota pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang Kota sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan umum bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan untuk operasi penerbangan, kegiatan penunjang operasi penerbangan, kegiatan pengembangan operasi penerbangan, kegiatan kepabeanan, karantina, imigrasi, serta kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, akomodasi, pergudangan yang mendukung kegiatan bandar udara dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang;
 2. utilitas kota yang penting dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, membuat halangan (*obstacle*) dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi utama bandar udara;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengacu kawasan transportasi;
 - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota dan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota di sekitar kawasan bandar udara yang merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung optimalisasi kawasan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana jaringan transmisi dan distribusi energi listrik dan Pemanfaatan Ruang Kota lainnya yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas kegiatan penghijauan, taman, perparkiran dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan Ruang Kota yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna optimalisasi fungsi kawasan meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik, fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan jaringan bergerak serta tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan lain meliputi:
 - 1. ketentuan teknis pembangunan infrastruktur pasif bersama;
 - 2. jarak antar menara/tiang telekomunikasi;
 - 3. ketentuan lokasi dan menara/tiang telekomunikasi bersama; dan
 - 4. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan pendukungnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas kota untuk kepentingan publik yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan dan jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kegiatan bangunan sumber daya air; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Ketentuan umum zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi SPAL;
- c. ketentuan ...

- c. ketentuan umum zonasi drainase;
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan persampahan; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jaringan evakuasi bencana
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan dan areal parkir; dan
 - 2. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. pembangunan ...

2. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan permukiman;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum; dan
 2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3 dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 2. mengalirkan ...

2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan Budi Daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat menjaring sampah; dan
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. pengoperasian pengolahan sampah berupa pemilahan;
 2. pengumpulan;
 3. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 4. pengurugan berlapis bersih;
 5. pemeliharaan TPA sampah;
 6. industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional pengolahan dan pemrosesan sampah; dan
 7. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. pertanian non-pangan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota untuk sistem jaringan persampahan:
 1. KDB untuk TPS3R maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB untuk TPST maksimal 60% (enam puluh persen);
 3. KDB untuk TPA maksimal 40% (empat puluh persen);

4. Intensitas ...

4. Intensitas maksimal 2 (dua) kali KDB; dan
 5. KDH minimal 15% (lima belas persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan;
 3. fasilitas operasi; dan
 4. fasilitas penunjang.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman;
 2. sumber air baku; dan
 3. kawasan di sekitar zona inti TPA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan dalam rencana Pola Ruang Kota serta bangunan publik untuk kegiatan darurat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama ruang yang ditetapkan serta kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk mendukung pengembangan ruang evakuasi bencana berupa fasilitas darurat sementara untuk mendukung kegiatan evakuasi, seperti fasilitas MCK, fasilitas dapur umum, fasilitas kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi, papan informasi, serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai standar kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan umum Zonasi Pola Ruang Kota

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;

2. olahraga ...

2. olahraga air dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
 3. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
 4. pemanfaatan air untuk sumber air baku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair;
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
 3. mendirikan bangunan di atas badan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal;
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 5. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan Budi Daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan ...

2. kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 3. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 2. dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan penanaman tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 - 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas);
dan
 - 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. bangunan pengendali banjir, seperti tanggul, bronjong sungai, bendungan; dan
 - 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan hunian penduduk asli/setempat, perlindungan satwa, penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan, fasilitas umum dan fasilitas sosial terbatas untuk melayani penduduk setempat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan kearifan lokal;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 1,4 (satu koma empat); dan
 - 3. KDH minimal adalah 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan infrastruktur kota untuk melayani kebutuhan penduduk, jalur evakuasi bencana dan fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota;
 - c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
 - d. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jalur hijau jalan.
- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pariwisata alam;
 - 2. rekreasi alam;
 - 3. olah raga;
 - 4. penelitian dan pengembangan;
 - 5. pendidikan;
 - 6. pelestarian plasma nutfah; dan
 - 7. budi daya hasil hutan bukan kayu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - 2. tempat pedagang;
 - 3. jaringan infrastruktur kota;
 - 4. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan
 - 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon dan pipa air minum selama tidak mengganggu fungsi rimba kota, tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan rimba kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota kawasan rimba kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. toilet umum;
 - 2. fasilitas ibadah;
 - 3. tempat pengumpulan sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. prasarana parkir kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 - 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 - 3. papan reklame/informasi kota; dan
 - 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal adalah 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir pendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. tempat sampah;
 5. jalur evakuasi bencana; dan
 6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (4) Ketentuan umum zonasi taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. papan reklame/informasi kota;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 5. tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kecamatan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal adalah 75% (tujuh puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. tempat ...

4. tempat sampah;
 5. jalur evakuasi bencana; dan
 6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (5) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemakaman, penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame/informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal adalah 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi terbatas;
 - 2. kegiatan olah raga terbatas;
 - 3. bangunan penunjang prasarana kota;
 - 4. papan reklame/informasi kota; dan
 - 5. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan jalur hijau;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - 3. KDH minimal adalah 90% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. papan informasi;
 - 2. tempat sampah;
 - 3. jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d meliputi ketentuan umum taman hutan raya.
- (2) Ketentuan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - 3. koleksi ...

3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam;
 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang Budi Daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. wisata alam;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa terbatas yang mendukung kegiatan wisata alam;
 3. pembangunan jaringan utilitas perkotaan seperti jaringan air minum, jaringan pengolahan air limbah, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 4. ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman hutan raya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal adalah 85% (delapan puluh lima persen).
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
 2. fasilitas ...

2. fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan wisata alam meliputi:
 - a. penyediaan air minum;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. pengolahan air limbah; dan
 - e. persampahan.
3. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
4. fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 102

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan RTNH; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan; dan
 3. infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan drainase.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 2. fasilitas pendidikan dan kesehatan skala lingkungan;
 3. fasilitas perkantoran skala lingkungan;
 4. fasilitas peribadatan;
 5. fasilitas pengolahan sampah skala lingkungan;
 6. industri kecil non-polutan yang ditetapkan sebagai sentra industri kecil;
 7. kegiatan transportasi skala lingkungan/kota; dan
 8. pembangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan perumahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama hunian, seperti perdagangan dan jasa skala kota, industri, pergudangan, fasilitas umum dan sosial skala kota, perkantoran skala kota dan lain sebagainya;
- d. ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal untuk bangunan vertikal dengan ketentuan lebih dari 4 (empat) lantai adalah 40% (empat puluh persen);
 2. KDB ...

2. KDB maksimal untuk bangunan rendah paling tinggi 3 (tiga) lantai di kawasan adalah 70% (tujuh puluh persen);
 3. KDB maksimal untuk kapling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah 80% (delapan puluh persen);
 4. KLB maksimal untuk bangunan vertikal adalah 4,0 (empat koma nol);
 5. KLB maksimal untuk bangunan rendah adalah 3 (tiga) kali KDB;
 6. KDH minimal untuk bangunan vertikal adalah 40% (empat puluh persen);
 7. KDH minimal untuk bangunan rendah adalah 15% (lima belas persen); dan
 8. KDH minimal untuk kapling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, sistem persampahan dan sistem proteksi kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai standar kebutuhan minimal; dan
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga dan fasilitas transportasi skala kota dan lebih rendah;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perkantoran, fasilitas perumahan yang mendukung kegiatan utama fasilitas sosial dan fasilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama dan tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;
- d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial skala kota adalah 4,8 (empat koma delapan);
 - 3. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial skala SWK/kecamatan/ lingkungan adalah 2,4 (dua koma empat); dan
 - 4. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. fasilitas parkir untuk pegawai dan pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
 - 2. fasilitas pendukung seperti fasilitas peribadatan, toilet umum, pos/ruang kesehatan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan standar minimal;
 - 3. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 4. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengolahan air limbah, fasilitas pengolahan sampah dan sistem pemadam kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 1. kegiatan tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat seperti olah raga, penyediaan plaza, monumen, ruang evakuasi bencana dan *landmark* kota; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan rekreasi dan olah raga yang tidak mengganggu fungsi RTNH, kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota secara terbatas untuk menunjang sektor informal, parkir dan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama RTNH dan merusak estetika kawasan;
- d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, tempat sampah dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
 2. fasilitas parkir sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pemrosesan sampah dan fasilitas distribusi listrik;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. industri pengolahan limbah dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah;
 2. bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lain sebagainya yang mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan;
 - d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jalur perantara (*buffer zone*) untuk menghindari dampak negatif kegiatan infrastruktur perkotaan dengan kegiatan di sekitarnya;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. sistem proteksi kebakaran; dan
 4. fasilitas pendukung lainnya sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan tinggi, kesehatan, olah raga, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan wisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, perumahan;
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama perdagangan dan jasa serta menimbulkan polusi dan dampak lingkungan, seperti industri besar dan sedang, pergudangan yang bukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kota adalah 5,6 (lima koma enam);
 3. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala SWK adalah 2,8 (dua koma delapan);
 4. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan dan lingkungan adalah 2,1 (dua koma satu); dan
 5. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas bongkar muat barang sesuai standar kebutuhan minimal;

3. fasilitas ...

3. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai standar kebutuhan minimal;
4. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;
5. fasilitas peribadatan dan pos Kesehatan untuk fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
6. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan air limbah, persampahan sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan; dan
7. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan SWK.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan perkantoran yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. perkantoran pemerintahan;
 2. pemerintahan kota;
 3. pemerintahan provinsi;
 4. pemerintahan pusat; dan
 5. BUMD/BUMN.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. hunian untuk pegawai;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. fasilitas kesehatan;
 4. fasilitas olah raga;
 5. fasilitas peribadatan;
 6. fasilitas sosial;
 7. fasilitas perdagangan dan jasa; dan
 8. pergudangan yang mendukung kegiatan perkantoran.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang bertentangan dan mengganggu fungsi utama perkantoran;

d. Ketentuan ...

- d. Ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal untuk luas lantai $\geq 5.000 \text{ m}^2$ (lebih besar atau sama dengan lima ribu meter persegi) adalah 50% (lima puluh persen);
 2. KDB maksimal untuk luas lantai $< 5.000 \text{ m}^2$ (kurang dari lima ribu meter persegi) adalah 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimal untuk luas lahan $\geq 5.000 \text{ m}^2$ (lebih besar atau sama dengan lima ribu meter persegi) adalah 2,5 (dua koma lima);
 4. KLB maksimal untuk luas lahan $< 5.000 \text{ m}^2$ (kurang dari lima ribu meter persegi) adalah 2,4 (dua koma empat); dan
 5. KDH minimal adalah 25% (dua puluh lima persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk kendaraan pegawai dan pengunjung sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan perkantoran seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
1. industri kecil;
 2. industri menengah;
 3. industri ...

3. industri besar; dan
 4. pergudangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan perkantoran;
 2. tempat tinggal karyawan;
 3. terminal barang;
 4. jasa ekspedisi/kargo;
 5. perdagangan dan jasa; dan
 6. fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan industri.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti polusi udara, kerusakan kawasan resapan air, peningkatan kekritisian cekungan air tanah dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal untuk industri besar dan industri sedang yang berlokasi di jalan arteri dan jalan kolektor adalah 40% (empat puluh persen);
 2. KDB maksimal untuk industri kecil adalah 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimal untuk industri besar dan industri sedang adalah 1,2 (satu koma dua);
 4. KLB maksimal untuk industri kecil adalah 1,8 (satu koma delapan);
 5. KDH minimal untuk industri besar dan industri sedang adalah 20% (dua puluh persen); dan
 6. KDH minimal untuk industri kecil adalah 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk angkutan pegawai dan angkutan barang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas bongkar muat barang sesuai kebutuhan; dan

3. utilitas ...

3. utilitas dan fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, IPAL, unit pemadam kebakaran, pos Kesehatan, fasilitas peribadatan dan lain sebagainya.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perdagangan;
 2. jasa akomodasi;
 3. jasa penyediaan makanan/minuman;
 4. jasa wisata;
 5. pendidikan;
 6. kesehatan;
 7. sosial;
 8. olahraga yang mendukung kegiatan utama pariwisata; dan
 9. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan mengurangi kualitas daya tarik wisata, seperti kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan lain sebagainya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir sesuai potensi pengunjung dan mengacu peraturan perundang-undangan;

2. fasilitas ...

2. fasilitas pendukung pariwisata, seperti tempat ibadah, klinik/pos kesehatan, pemadam kebakaran, fasilitas peribadatan, toilet umum dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. utilitas pendukung pariwisata, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota untuk pertanian pangan dan hortikultura beserta kegiatan penyiapan, produksi dan pengolahan pasca panen;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan Budi Daya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya; dan
 3. kegiatan penelitian pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani dan/atau pemilik lahan;
 3. konstruksi bangunan non hunian untuk mendukung pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 4. kegiatan peternakan dan perikanan Budi Daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 5. pembangunan ...

5. pembangunan jaringan infrastruktur kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, industri, pertambangan dan lain sebagainya.
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi jaringan irigasi/air baku, fasilitas untuk penanaman dan paska panen dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung produksi pertanian tanaman pangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasi transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perkantoran;
 4. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 5. pergudangan yang mendukung kegiatan utama operasi transportasi.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran transportasi.
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,4 (satu koma delapan); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pendukung kegiatan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perkantoran untuk pertahanan dan keamanan;
 - 2. bangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. rumah dinas; dan
 - 4. ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. rumah susun umum, negara atau khusus sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi dan fasilitas sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang Kota yang untuk mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas ruang berupa KDB maksimal, KLB maksimal dan KDH minimal mengacu pada fungsi utama kawasan pertahanan dan kemananan yang meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan intensitas ruang kawasan perkantoran;
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama sebagai perumahan dinas mengikuti ketentuan intensitas ruang kawasan perumahan;
 - 3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olah raga mengikuti ketentuan intensitas ruang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 4. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah Latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada kegiatan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran;
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan;
 - 3. ketentuan ...

3. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olah raga mengikuti ketentuan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan. memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*);
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKOP;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. KP2B.

Pasal ...

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 - c. bangunan yang melebihi batasan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika;
 - d. pendirian bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu;
 - e. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat, antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - g. penggunaan ...

- g. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- h. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
- i. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(2) Ketentuan ...

- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota secara terbatas untuk kegiatan Budi Daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang Kota wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan Budi Daya terbangun yang diajukan izinnnya;
 - e. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - f. penerapan KDB rendah pada setiap persil kegiatan Budi Daya terbangun;
 - g. dalam hal terdapat kawasan peruntukkan yang berada di dalam KBU, seluruh Pemanfaatan Ruang Kota wajib mengikuti peraturan Rencana Tata Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang KBU, baik dalam peta rencana pola ruang zona perumahan kepadatan rendah, maupun Peraturan Zonasi zona perumahan kepadatan rendah yang berlokasi di zona konservasi atau lindung utama KBU akan diatur lebih rinci dalam RDTR Kota Bandung.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi serta RTH;
 - b. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman diperbolehkan dengan memperhatikan daya dukung lahan agar tidak terjadi longsor tepi sungai;
 - c. pada kawasan sempadan sungai yang telah ada bangunan, tidak diperkenankan menambah bangunan baru;
 - d. pelarangan pembuangan air limbah (*black water*) dan sampah ke badan sungai; dan
 - e. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pengaturan untuk upaya pelestarian terhadap bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan struktur cagar budaya yang berada di dalam kawasan cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan membongkar dan mengubah bangunan dan struktur cagar budaya golongan A dan golongan B;
 - c. perubahan Bangunan cagar budaya golongan C dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;
 - d. dalam situs cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang mengacu pada karakter arsitektur Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan;
 - e. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam sepanjang tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
 - g. pelarangan Pemanfaatan Ruang Kota yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.
- (2) Penetapan bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan struktur cagar budaya diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pengaturan pelaksanaan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagara budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah;
 - b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing;
 - c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan;
 - d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan
 - h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi meliputi:
- a. pelarangan mendirikan bangunan pada daerah kawasan aliran lahar dingin;
 - b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi meliputi:
- a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dalam ...

- b. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. KP2B yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan Pemanfaatan Ruang Kotanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dalam hal terjadi perubahan luasan KP2B dan/atau lahan sawah dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 117

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang Kota yang tidak sesuai rencana tata ruang.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 118

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat diberikan berupa:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian keringan pajak;
 - b. pemberian keringanan retribusi; dan/atau
 - c. pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 119

- (1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage, pengembangan SPK serta pelestarian bangunan dan kawasan.
- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan;
 - b. pembangunan akses jalan bebas hambatan di PPK Gedebage;
 - c. pembangunan danau yang sekaligus sebagai tempat rekreasi;
 - d. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif untuk mendorong pengembangan SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase;
 - e. pemberian keringanan pajak; dan/atau pengurangan retribusi;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan ...

- h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan bersejarah meliputi:
- a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
 - b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak merubah bentuk bangunan.

Pasal 120

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 119 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat diberikan berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/ imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal ...

Pasal 122

- (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di KBU dan mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat.
- (2) Disinsentif khusus, yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan di KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona lindung;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan Punclut; dan/atau
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota.
- (3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di Wilayah Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 123

Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 122 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

(2) Arahan ...

- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang Kota.
- (3) Sanksi administratif diberikan terhadap:
 - a. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak memiliki KKPR;
 - b. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR; dan/atau
 - c. pemanfaatan Ruang Kota yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.
- (6) Tata cara penyelenggaraan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 125

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota.
- (5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 127

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 128

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap ...

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 129

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Kota.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 130

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 131

- (1) Dalam rangka pengembangan RTRWK dilakukan kerja sama daerah.
- (2) Tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 132

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Kota wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kota dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 133

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang Kota yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur Pemanfaatan Ruang Kota serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang Kota yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 135

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. proses Perencanaan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan Ruang Kota; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
- (3) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (6) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui unit kerja terkait.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRWK berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ini dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 137

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang Kota dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Untuk operasionalisasi RTRWK disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik ...

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 140

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk ...

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal ...

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/159/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mengalami perubahan dalam berbagai aspek dan bidang sejak tahun berlakunya RTRW Kota Bandung Tahun 2011. Perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang kemudian diamanatkan pada Peraturan Nasional, secara otomatis memberikan pengaruh secara sosial dan kepastian hukum.

Perencanaan tata ruang pada akhirnya menjadi gerbang untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, sekaligus menjadi tempat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perubahan terhadap kebijakan nasional tersebut. Mengingat keterbatasan lahan, kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Bandung, perencanaan tata ruang yang ada menjadi tidak lagi relevan menjadi pemecah masalah. Oleh karena itu, demi mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu dilakukan perubahan rencana tata ruang terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung yang ada.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung dilakukan demi melaksanakan fungsi ruang yang bermanfaat bagi penduduk Kota Bandung, yang juga mempertimbangkan dampaknya bagi wilayah di sekitar Kota Bandung. Penyelenggaraan perubahan RTRW mempertimbangkan juga prediksi ruang yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, sehingga perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung yang dilaksanakan saat ini menjadi perencanaan menyeluruh yang dapat berlaku untuk beberapa waktu ke depan dan dapat menjadi solusi ruang di masa yang akan datang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menambah dinamika ketentuan dalam mengatur penataan ruang. Perubahan konsep dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha, menyebabkan izin pemanfaatan ruang berubah menjadi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah satu dari penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Pemerintah berupaya untuk menyediakan kemudahan bagi pelaku usaha/kegiatan dalam menanamkan modal, namun di sisi lain Pemerintah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan usaha/kegiatan tersebut patuh dalam prosedur yang telah ditentukan. Penataan ruang menjadi salah satu ukuran dalam memastikan kesesuaian lokasi dengan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

Sebagai pelaksana penyelenggaraan penataan ruang di daerah, Kota Bandung perlu menyesuaikan peraturan tata ruang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, serta memperhatikan kebijakan terkait tata ruang yang berlaku, sehingga perencanaan tata ruang di Kota Bandung dapat diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dinamika dan muatan lokal Kota Bandung namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kесerasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “berbudaya” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada budaya daerah dan nasional, dan bahwa penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya dan berkembangnya budaya Daerah dan Nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawab-kan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Berorientasi Transit” yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompak” adalah pengembangan kota yang dilakukan dengan menekankan kota dan lansekap, menambahkan pembangunan pada struktur yang sudah ada, mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkat bagian wilayah kota, menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk pembangunan dengan kepadatan tinggi, dan menekankan pada transportasi umum

Yang dimaksud dengan “intensif dan hijau” adalah Intensifikasi Lahan dengan Upaya dan Pembangunan Vertikal dan Penyisipan (*Vertical and Infill Development*).

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pola jaringan transportasi” adalah pola jaringan untuk mendukung Konsep pengembangan TOD. TOD menuntut pengembangan pola ruang campuran (*mixed-use*) dalam jarak radius 600 m dari titik TOD. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar titik TOD paling sedikit meliputi komersial, hunian, pelayanan umum, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan pertahanan dan keamanan; kawasan pertanian; dan pelayanan umum, kesehatan, peribadatan, dan transportasi

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Sudut kepentingan kawasan strategis kota meliputi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional; antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah; antara pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan pelabuhan utama/pengumpul; atau antara pusat kegiatan nasional dan/atau wilayah dengan bandar udara utama/pengumpul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Jalan Tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Penjelasan terkait tidak dapat digambarkannya lokasi jalan layang, simpang susun tidak sebidang dan perlintasan tidak sebidang pada peta rencana struktur ruang diuraikan pada bagian penjelasan.

Nomenklatur jalan bebas hambatan dalam kota Utara-Selatan yang merupakan kelanjutan dari jalan bebas hambatan Soreang-Pasirkoja yang terkoneksi dengan jalan bebas hambatan dalam kota Terusan Pasteur-Ujung Berung disempurnakan nomenklaturnya sesuai informasi dari DBMPR Prov. Jawa Barat menjadi: jalan bebas hambatan dalam kota yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol bebas hambatan dalam kota Terusan Pasteur – Ujungberung.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Terminal Barang” adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan” adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta api berkecepatan tinggi” adalah adalah sistem lintasan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kereta api massal cepat.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “reaktivasi” adalah proses/cara/perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali jalur kereta api yang telah ada agar berfungsi dan berjalan lebih optimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Stasiun Penumpang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Stasiun Barang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Transmisi Tenaga Listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Distribusi Tenaga Listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi” yang disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Tinggi” yang disingkat dengan SKTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 30 kV sampai dengan 150 kV.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah” yang disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Menengah” yang disingkat dengan SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap” adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Layanan dapat berupa layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan tertutup.

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak” adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, dapat berupa jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak Seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur Pasif Telekomunikasi” adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Banjir” adalah jaringan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bangunan Sumber Daya Air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kolam Retensi” adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum” yang disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah” yang disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Evakuasi Bencana” terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sistem Drainase” adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air ke badan atau jaringan drainase lainnya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku” adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Intake*” adalah adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah adalah jalur pipa atau saluran pembawa air baku dari titik awal transmisi air baku ke titik akhir transmisi air baku.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “IPA” adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “miniplant” adalah instalasi pengolahan air minum (IPA).

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah 3R” yang disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” yang disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu” yang disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Jalur Evakuasi Bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi jika terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Evakuasi Bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanggulangan lebih lanjut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi” adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Primer” adalah jaringan untuk menampung air dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai target hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Setempat” adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Permukiman Kumuh” adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Berpenghasilan Rendah” adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan utilitas kota” adalah pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat 1

Huruf h

Yang dimaksud dengan bangunan, misalnya seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* alami.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5



KETERANGAN :
 ■ Batas Administrasi
 □ Batas Kecamatan Kota
 --- Batas Kecamatan

● Pusat Pelayanan Kota
 ○ Sub Pusat Pelayanan Kota
 --- Sistem Jaringan Transportasi
 --- Jalan Arteri Primer
 --- Jalan Arteri Sekunder
 --- Jalan Kolektor Lokal
 --- Jaringan Jalur Koridor Air Arteri
 --- Jaringan Jalur Koridor Air Perantara

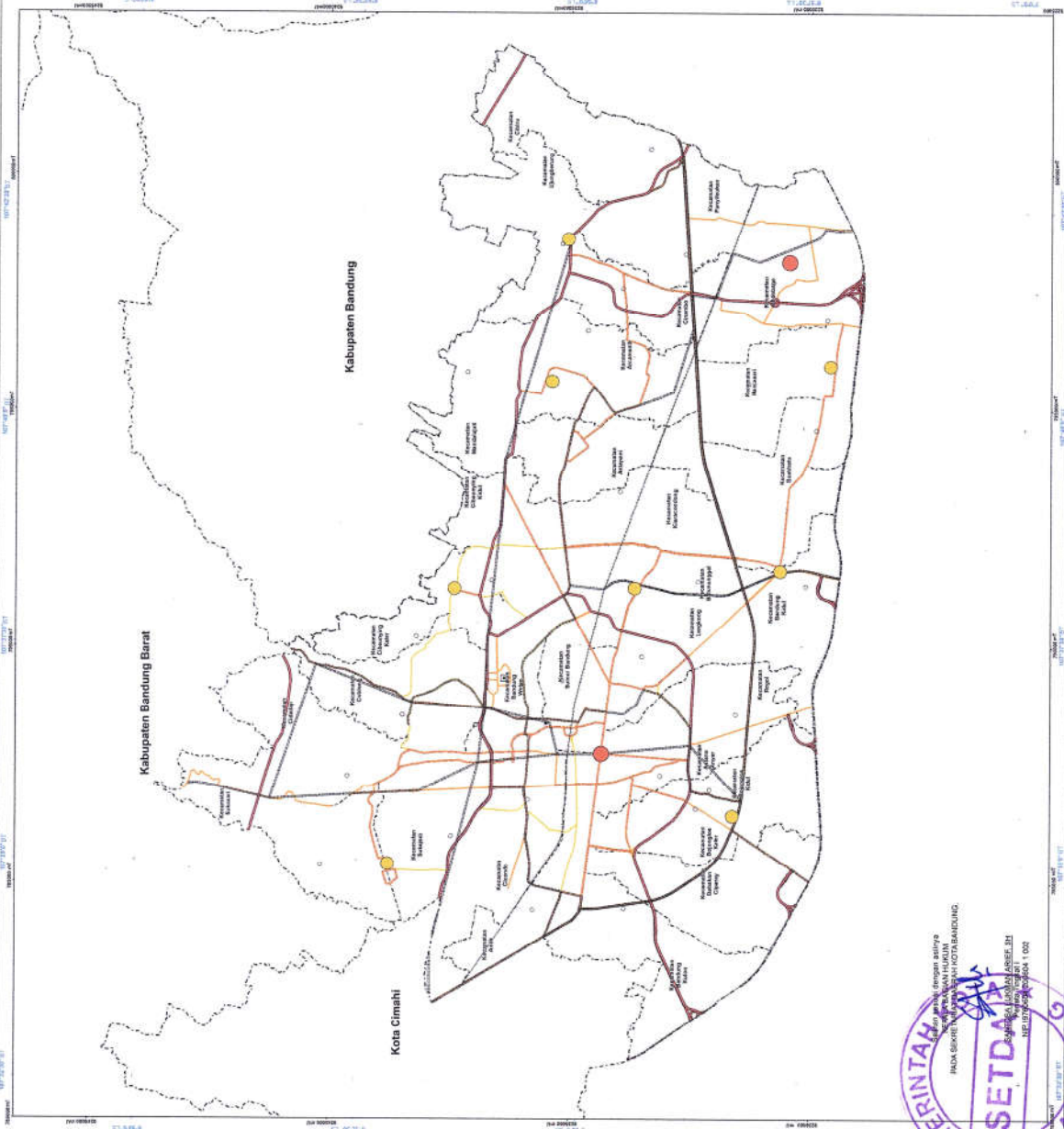
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Pelayanan
 ● Pusat Pelayanan Kota
 ○ Sub Pusat Pelayanan Kota
Sistem Jaringan Transportasi
 --- Jalan Arteri Primer
 --- Jalan Arteri Sekunder
 --- Jalan Kolektor Lokal
 --- Jaringan Jalur Koridor Air Arteri
 --- Jaringan Jalur Koridor Air Perantara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Dasar Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 dari Kantor Jang Raya Kota Bandung dan Badan Penyelenggara Sistem Informasi Geospasial (BPSIG)
2. Badan Penyelenggara Aerial Bandung (BPAB) dan Badan Penyelenggara Sistem Informasi Geospasial (BPSIG) Kota Bandung
3. Badan Penyelenggara Aerial Bandung (BPAB) dan Badan Penyelenggara Sistem Informasi Geospasial (BPSIG) Kota Bandung
4. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010

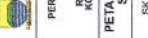
Catatan: Peta ini dibuat sebagai acuan integrasi planologi dan tata kelola kota.

WALI KOTA BANDUNG
 YAMA BULYANA



Halaman ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geospasial) berbasis ArcGIS 10.8.1 dan data spasial yang telah divalidasi oleh Badan Penyelenggara Sistem Informasi Geospasial (BPSIG) Kota Bandung.

PERMINTAH KOTA BANDUNG
SETDA
 NAMA: SETDA
 NIP. 197003119810001000



PERIPHERAL JAWA BARU
LAHIRAN 13
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
RENCANA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI



SKALA : 1 : 40.000

Projeksi
Sistem Koordinat
Datum Vertikal
Universitas Trusmi Mersier
Grid UTM dan Grid UTM Zona 48 S
- Oerd EGM 2008



DIAGRAM LOKASI

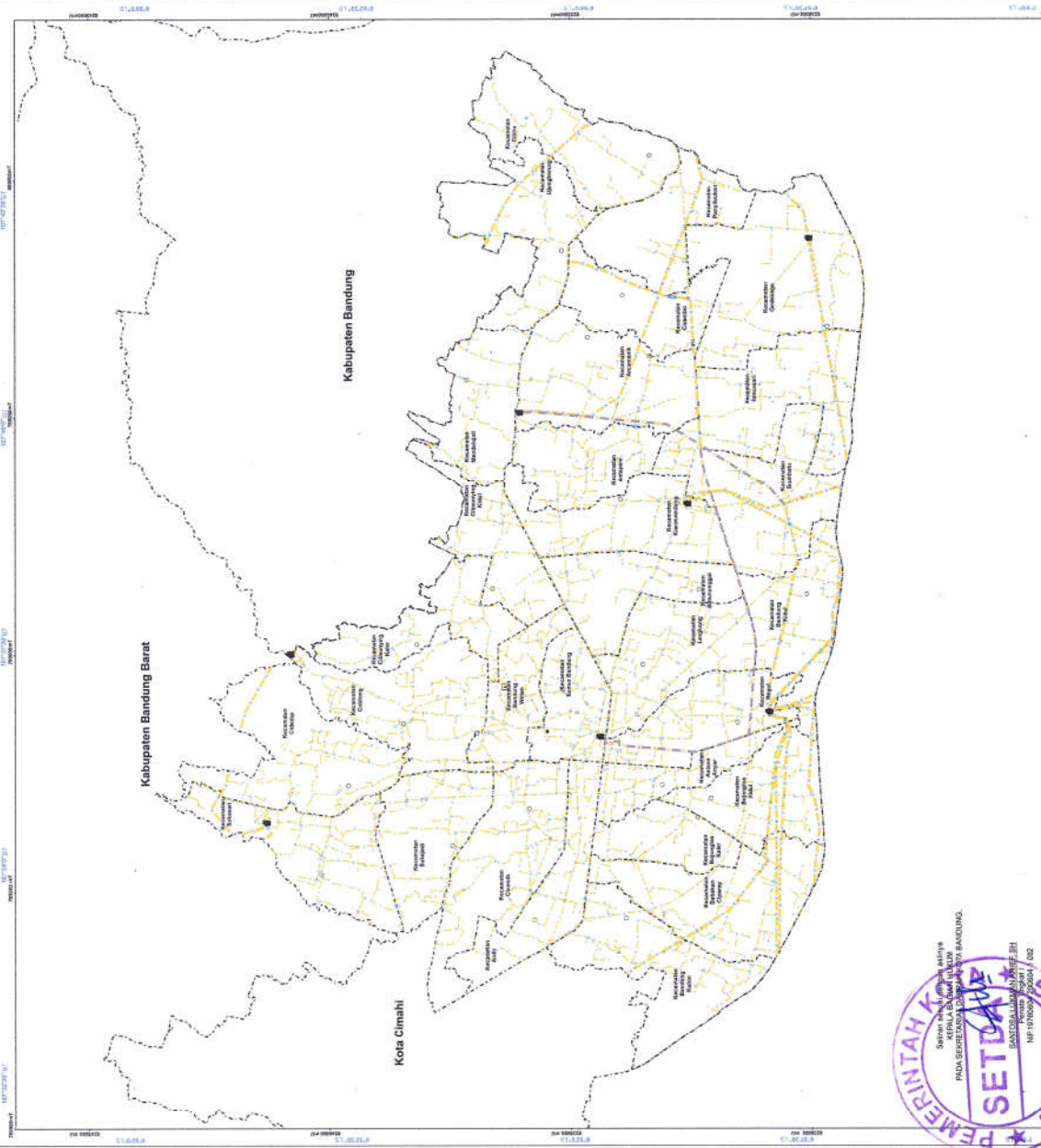
- KETERANGAN :**
- Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Kecamatan

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Jaringan Energi
 - Gardu Listrik
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
 - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DAYA DAN RUMAH TANGGA

1. Daya Listrik Tahun 2022 : 23.000 MW (Sumber tenaga yang telah diserahkan dan belum diserahkan) (Gubernur 2022)
2. Daya Listrik Tahun 2025 : 35.000 MW (Sumber tenaga yang telah diserahkan dan belum diserahkan) (Gubernur 2025)
3. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
4. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
5. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
6. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
7. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
8. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
9. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
10. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
11. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
12. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
13. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
14. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
15. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
16. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
17. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
18. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
19. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)
20. Rasio Pemenuhan : 100% (Rasio pemenuhan daya listrik yang telah diserahkan dan belum diserahkan)

WALI KOTA BANDUNG
TID.
YANI MULYANA





PERIPHERAL KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA: 1 : 40.000

0 1 2 4 Km

Proyek
Sistem Geospasial
Batas Wilayah

Universitas Pendidikan Indonesia
Geomatics Engineering
Jl. Setiabudi No. 221, Zone 48 S
Bandung 40132
Copyright © 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Persepsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Integritas Solutif
- Jaringan Ring

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

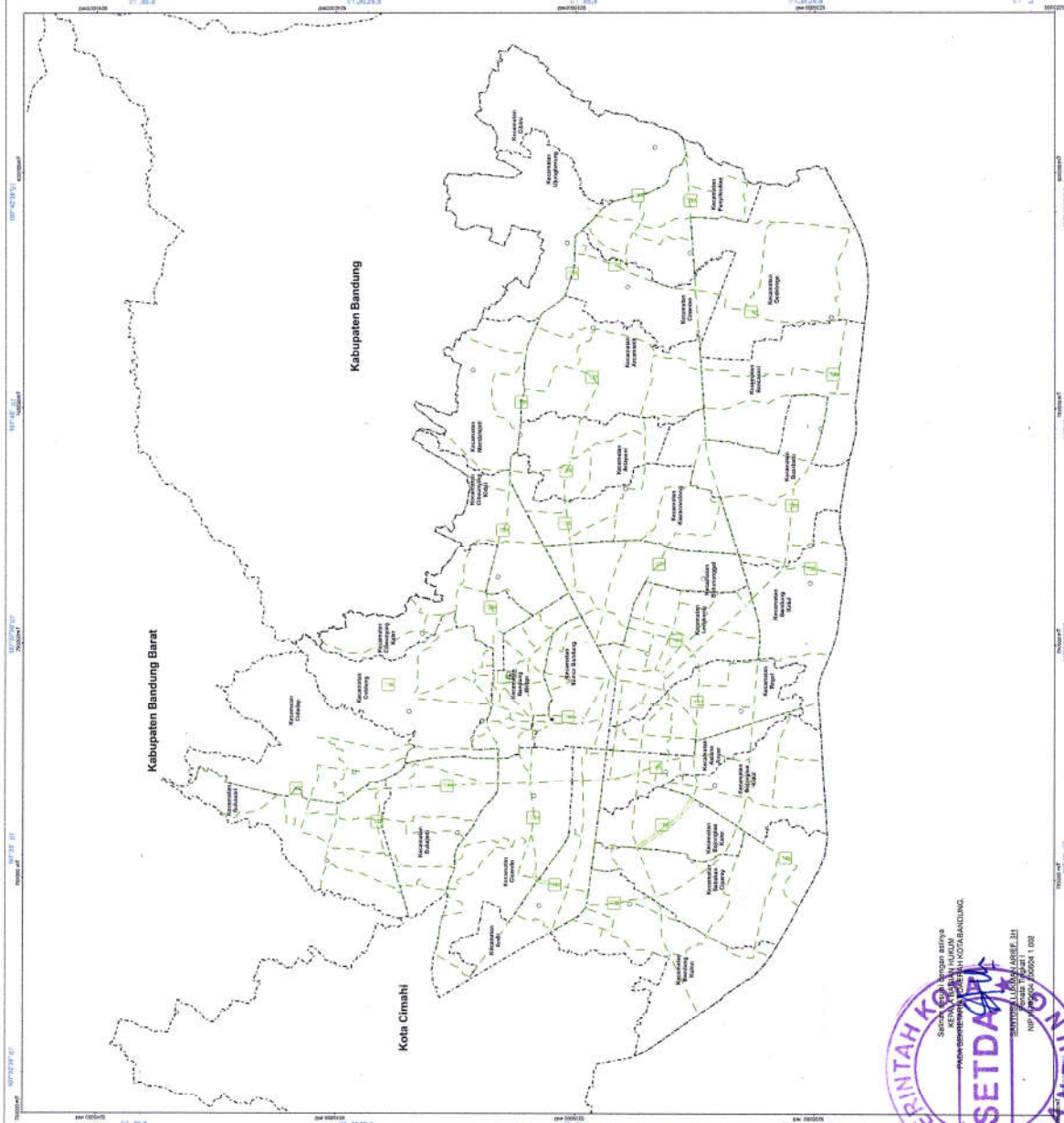
1. Data Spasial dari Pemerintah Kota Bandung
2. Data Spasial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Data Spasial dari Badan Koordinasi Survey dan Kartografi (BAKOSURTIALNAS)
4. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
5. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
6. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
8. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
9. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
10. Data Spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

Disusun : Pada 11 Desember 2008

WALI KOTA BANDUNG

1102

YANAMULYANA





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN I E
PEATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DATA AIR**

SKALA: 1 : 40.000



Proyeksi
Sistem Grid
Datum WGS 1984
Datum Vertikal
Datum Lokal

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengolahan Bersih

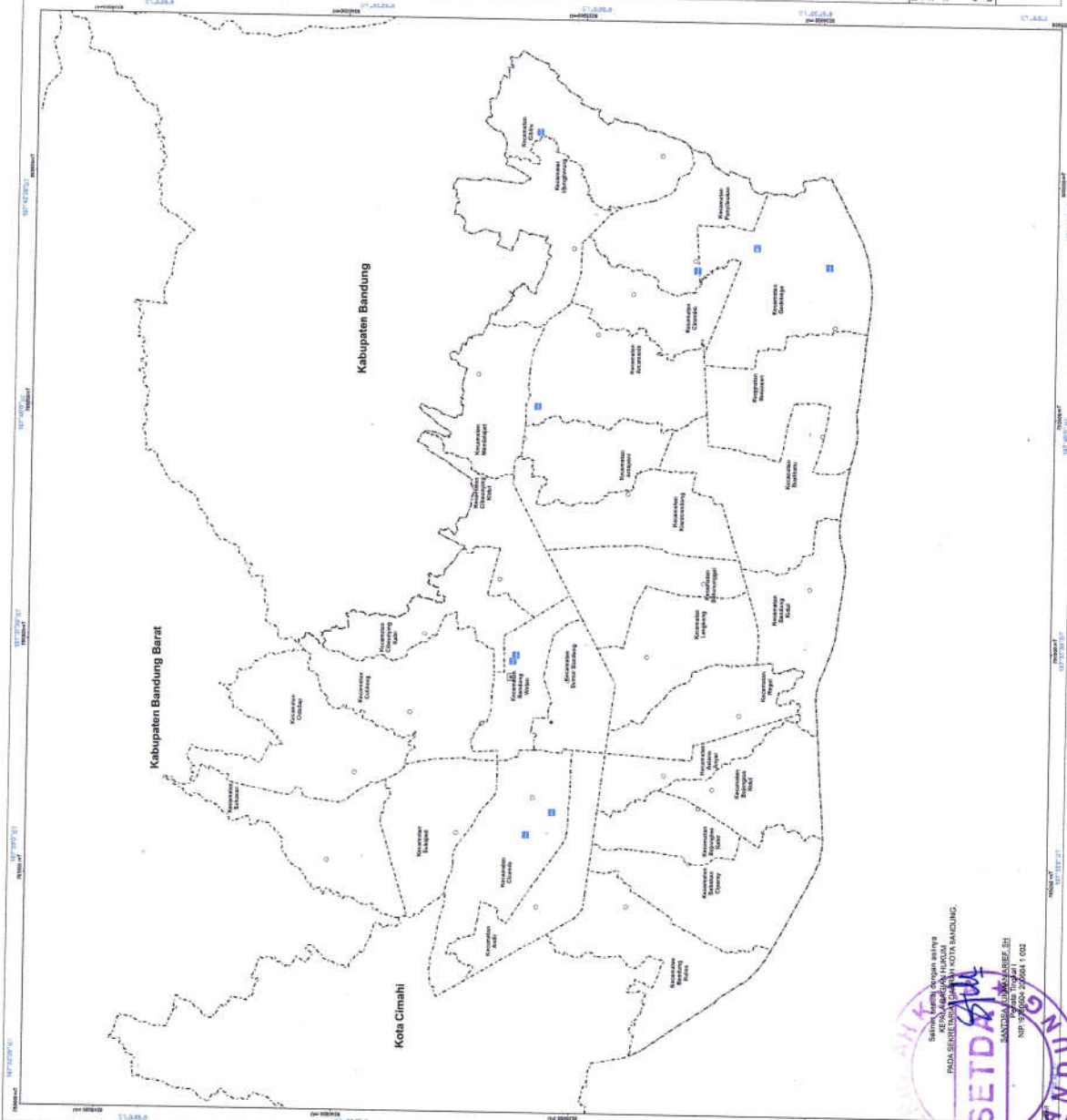
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Dasar Tahun 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 yang telah direvisi dan Sajian Informasi Geospasial (SIG)
2. Data Administrasi Kota Bandung (Sambit, 2019)
3. Data Administrasi Kota Bandung (Sambit, 2019)
4. Perencanaan dan RENCANA STRUKTUR RUANG SDR Kota Bandung dengan 1:40.000

WALI KOTA BANDUNG

TTE

YANA BILYANA



Sistem Jaringan Sumber Daya Air
KOTA BANDUNG
RANCANGAN STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DATA AIR
KOTA BANDUNG
TAHUN 2022-2042

SETDA

WALI KOTA BANDUNG
YANA BILYANA
NIP. 5710052020111002



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN I/B
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BENCANA TANPA WILAYAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2342

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

SKALA: 1 : 40.000



Uraian: Transmisi Magnetik
Garis Geografis Koordinat UTM Zone 48 S
Waktu: 02/01/2022
Cetakan: 02/01/2022



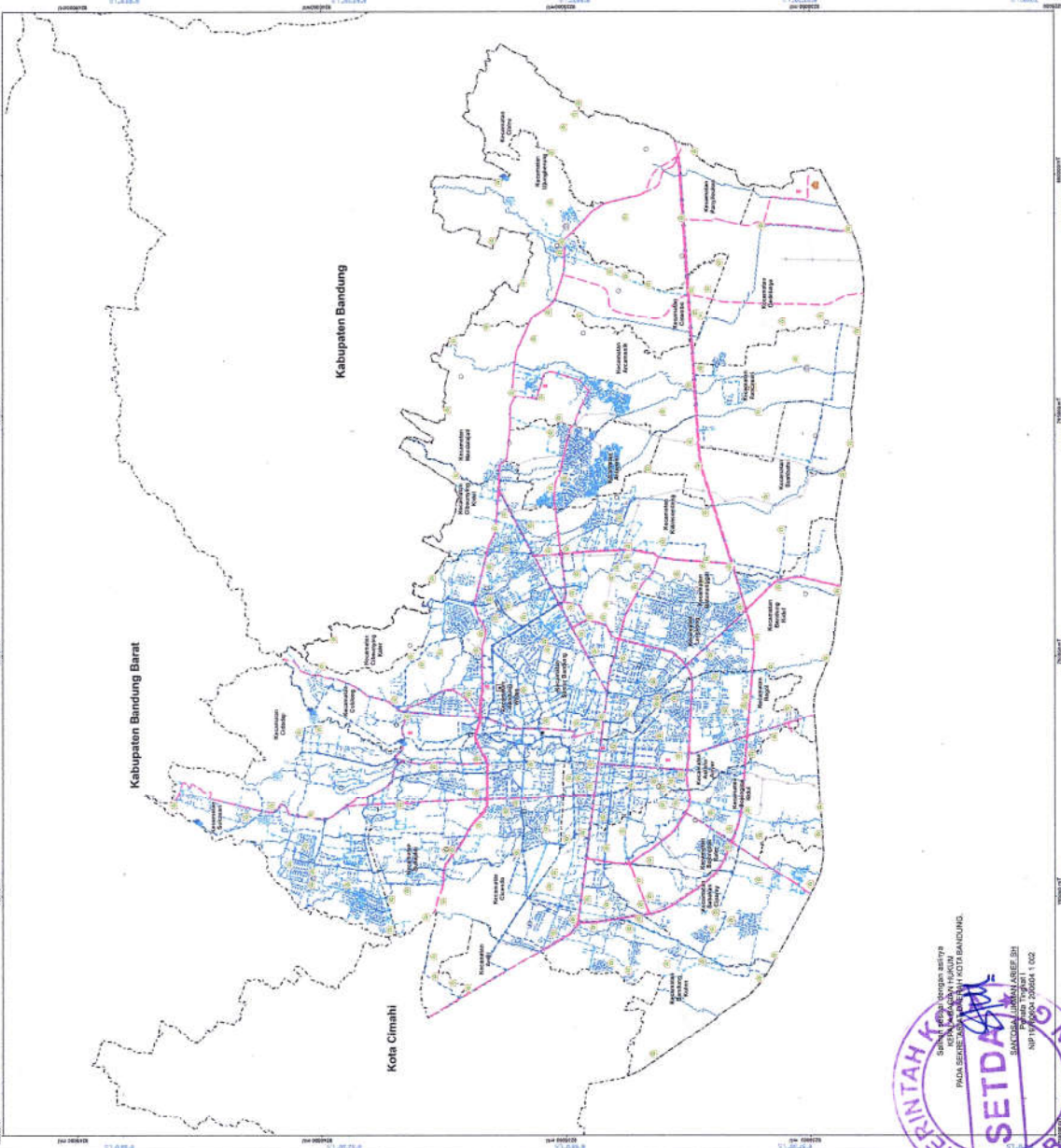
KETERANGAN :
 Kotak Putih : Batas Perumahan
 Garis Merah : Batas Perkotaan Kota
 Garis Hijau : Batas Kecamatan
 Garis Biru : Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Infrastruktur Perumahan
 Unit Air Baru
 Unit Air Lama
 Unit Air Baru
 Unit Air Lama
 Tempat Pemrosesan Air (TPA)
 Tempat Pengolahan Lumpur TPA (TPOL)
 Tempat Evaluasi Bencana
 Jaringan Drainase Primer
 Jaringan Drainase Sekunder
 Unit Distribusi
 Unit Transformasi Tegangan Ar
 Limbah Damsak
 Jalan Evaluasi Bencana

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :
 1. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 2. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 3. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 4. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 5. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 6. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 7. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 8. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 9. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)
 10. Data Dasar : Badan Pusat Statistik (BPS)

WALI KOTA BANDUNG

YANA MULYANA



Selama proses dengan asistya
 PAUZA SEKELAH KAWALAN KOTA BANDUNG
 SETDA
 SAKSIAN
 NIP 1970080200841002


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KEWASIHAN JAJAN BARAT

LAMARAN MUDA BANDUNG
PERATURAN KAWASAN POLA RUANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2042
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA



SKALA: 1:40.000


Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Datum Lokal: DUDUTM Zone 48 S
Datum Vertikal: Datum Vertikal
David EDM 2008



DIAGRAM LOKASI

















KETERANGAN :








Batas Administrasi
 Batas Kecamatan
 Batas Kecamatan








Jalan
 Jalan








RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
 Kawasan Lindung
 Kawasan Lindung








Batas Air
 Kawasan Perlindungan Seluasnya
 Kawasan Perlindungan Sebagian
 Kawasan Rintang Terbuka Hilir
 Terang Kota
 Tanah Kotoran
 Perumahan
 Jalan Pagar








Kawasan Bud Daya
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan

Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri
 Kawasan Industri

Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perumahan

Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan
 Kawasan Pertahanan

Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya
 Kawasan Cagar Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

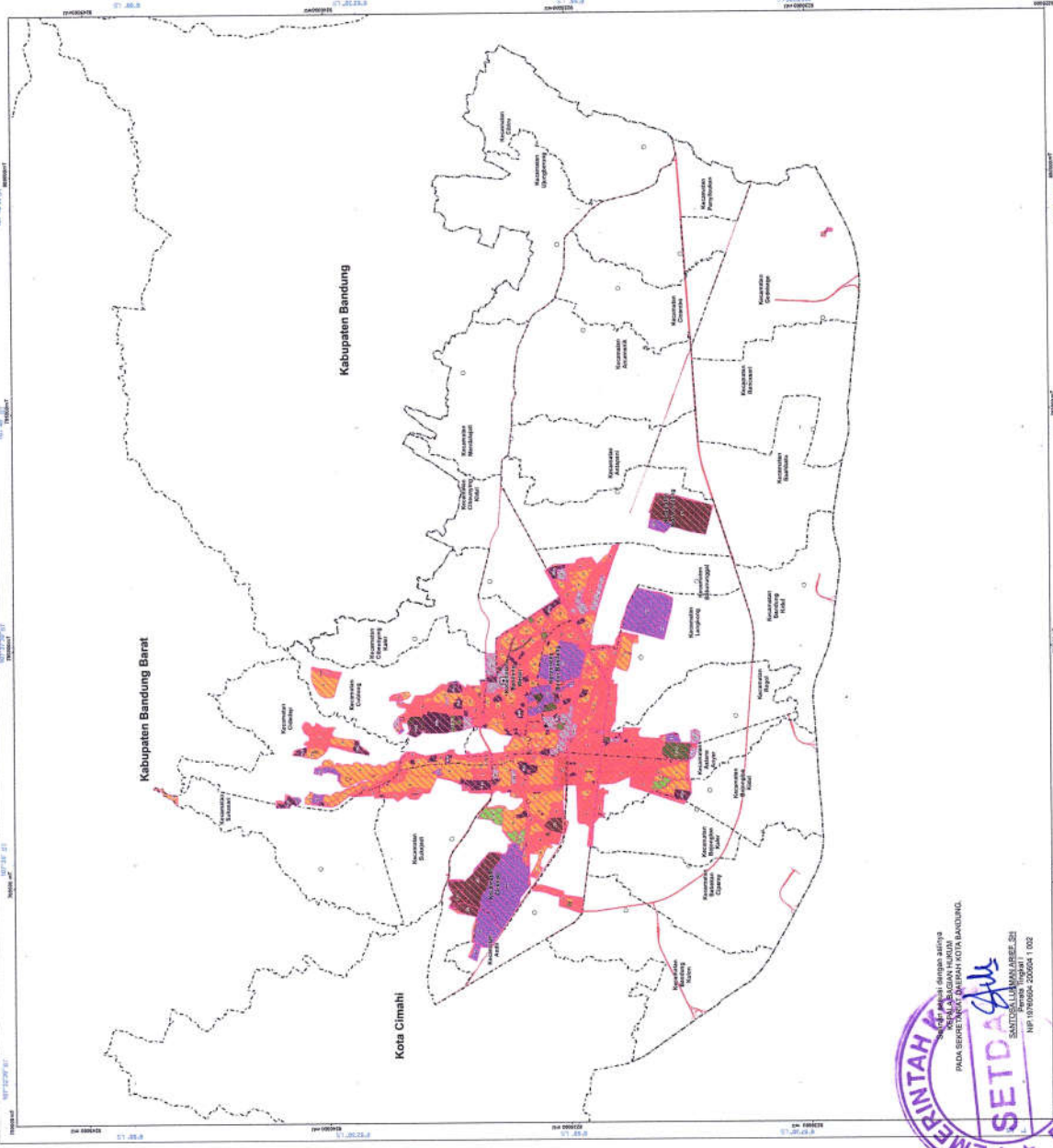
1. Data Dasar SRTM 1:25.000 dan Raster yang telah direktifikasi dan Shaded Relief Contour (SRC)
2. Data Dasar Citra 1:25.000 dan Raster yang telah direktifikasi dan Shaded Relief Contour (SRC)
3. Batas Administrasi Kota Bandung berdasar detail dan Raster yang telah direktifikasi dan Shaded Relief Contour (SRC)
4. Perencanaan Kota Bandung tahun 2022-2042 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 140/2019 yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2022-2042
5. Perencanaan Kota Bandung tahun 2022-2042 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 140/2019 yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2022-2042

Catatan: Peta ini dibuat sebagai referensi saja dan tidak memiliki kekuatan hukum.

WALI KOTA BANDUNG

TTD:

YANA MULYANA

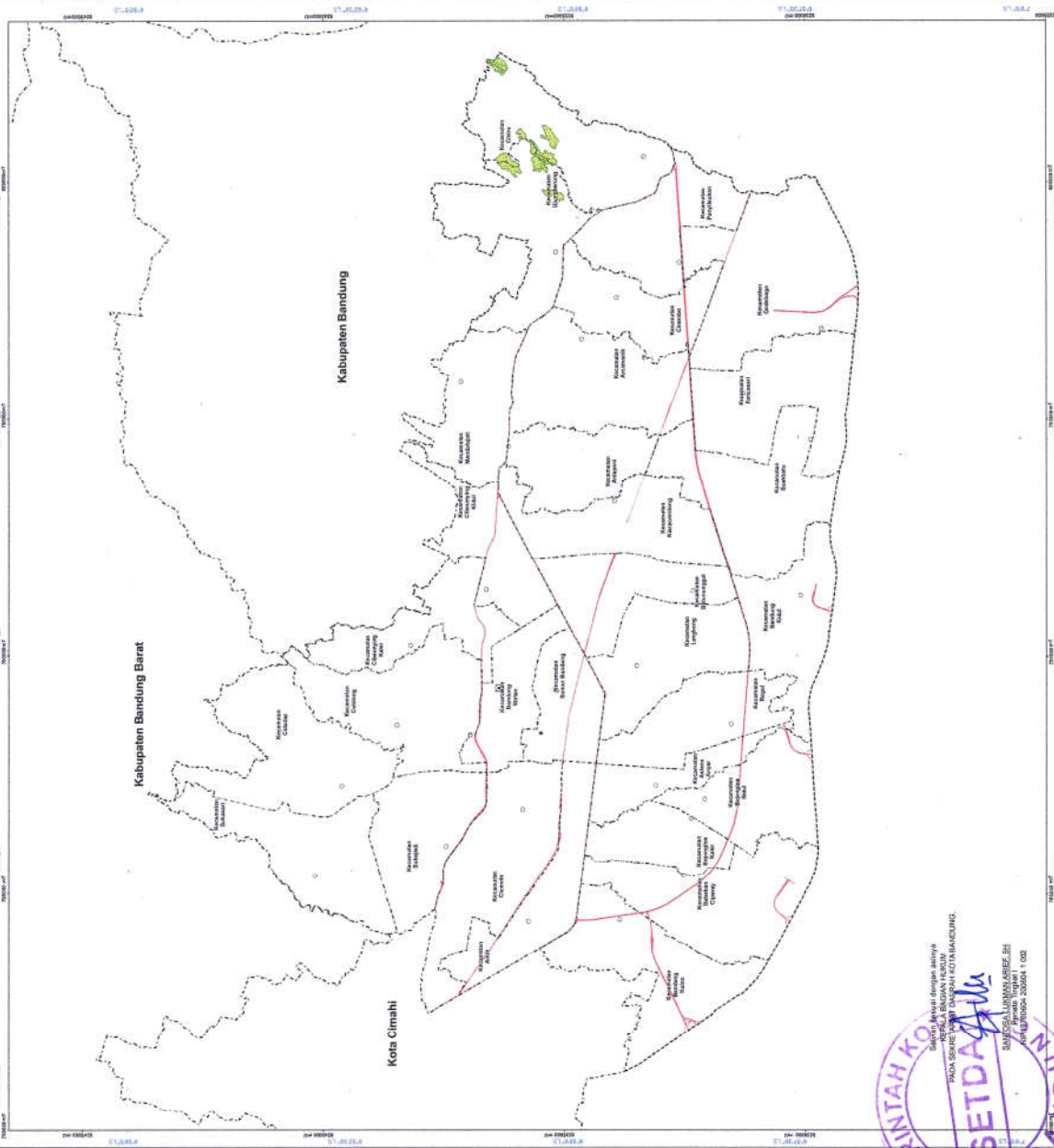


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 PADA SERTIFIKAT PERENCANAAN KHUSUS
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2042
 NIP. 1970606-20064 1 002

SEIDAHUS
 SANTOS LUMAMARSETI, S.T.
 NIP. 1970606-20064 1 002



- KETERANGAN :**
- Batas Perencanaan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Ibtikah Kecamatan
 - Ibtikah Kelurahan/Desa
 - Ibtikah Kampung
 - Jalan
 - Batas Jalan
 - RENCANA POLA RUANG
 - Kawasan Budidaya
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Perikanan Pengairan
 - Kawasan Perikanan Pengairan Berkelanjutan (KP2B)
 - Kawasan Perikanan Pengairan Berkelanjutan



SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :

1. Data Dasar (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
2. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
3. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
4. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
5. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
6. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
7. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
8. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
9. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)
10. Data Aerasi (Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000) dari Peta Topografi yang telah terupdate dan Matrik Informasi Geospasial (MIG)

Catatan : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diupdate.

WALI KOTA BANDUNG
TID.
YAMA MULYANA





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN ILL
PERATURAN DAERAH
KOMISI 5 TAHUN 2022
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2042

PETA PENYEDIAAN, PEMANFAATAN
DAN PENDISTRIBUSIAN RTH

SKALA: 1 : 40.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Garis Garis Lintang - Garis Garis Bujur
Datum Vertikal : Garis Rata-rata Air Laut
Datum Horizontal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

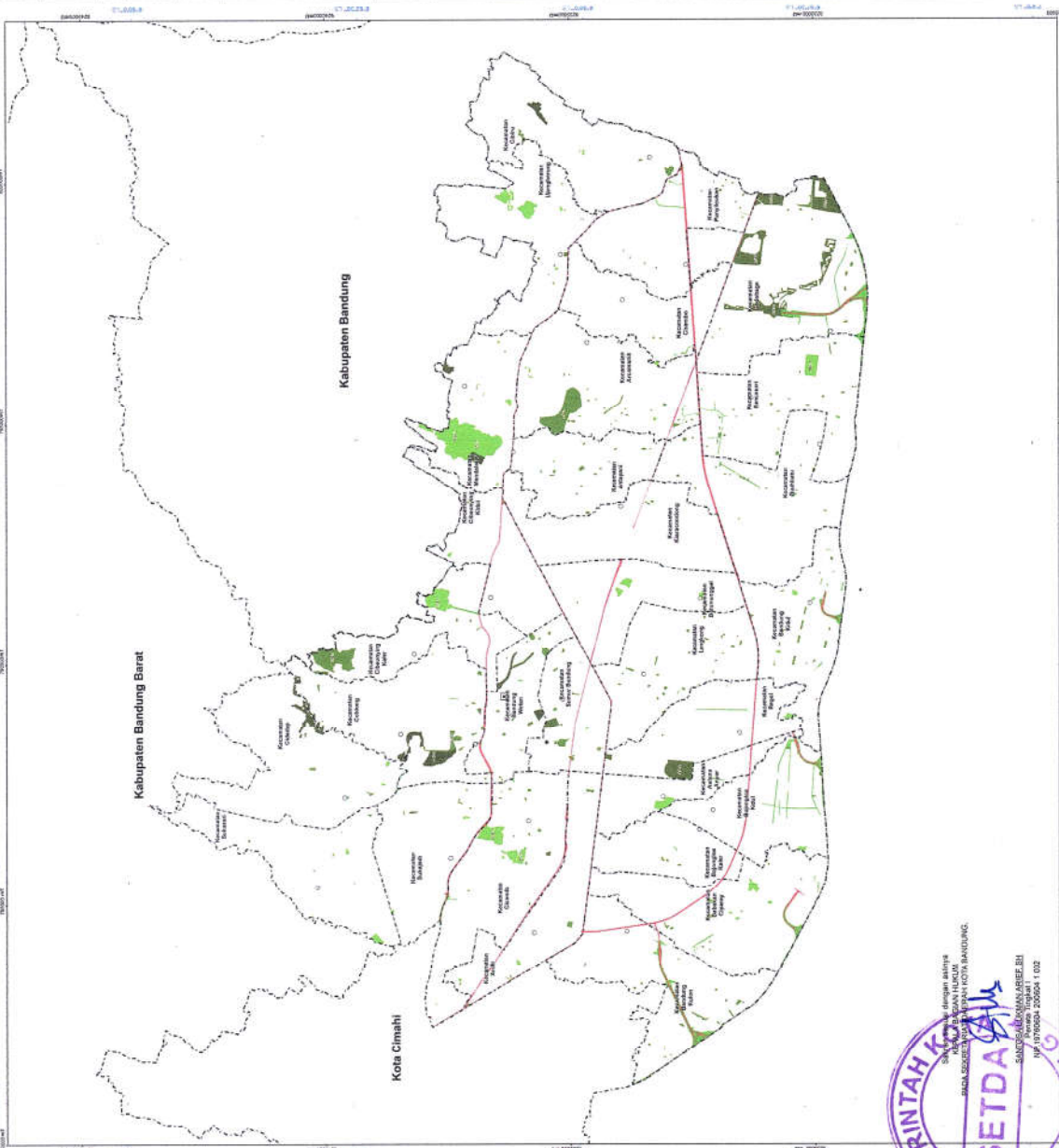


KETERANGAN :

- Batas Perencanaan
- Batas Kecamatan/Kota
- Batah Kecamatan
- Jalan
- Batas Jalan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung
- Rimbun Kota
- Kawasan Perkotaan
- Permukiman
- Jalur Hijau



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Dasar : Tahun 2019
2. Foto Udara : Tahun 2019
3. Data Administrasi Kota Bandung hasil dari :
 - A. Badan Administrasi Kota Bandung hasil dari :
 - 1. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 2. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 3. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 4. Badan Administrasi Kota Bandung
 - B. Badan Administrasi Kota Bandung hasil dari :
 - 1. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 2. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 3. Badan Administrasi Kota Bandung
 - 4. Badan Administrasi Kota Bandung
4. Perencanaan dan Implementasi : Tahun 2019

Catatan : Peta ini dibuat referensi untuk mengorganisir data geospasial yang ada di administrasi

WALI KOTA BANDUNG

TTL

YANA MULYANA

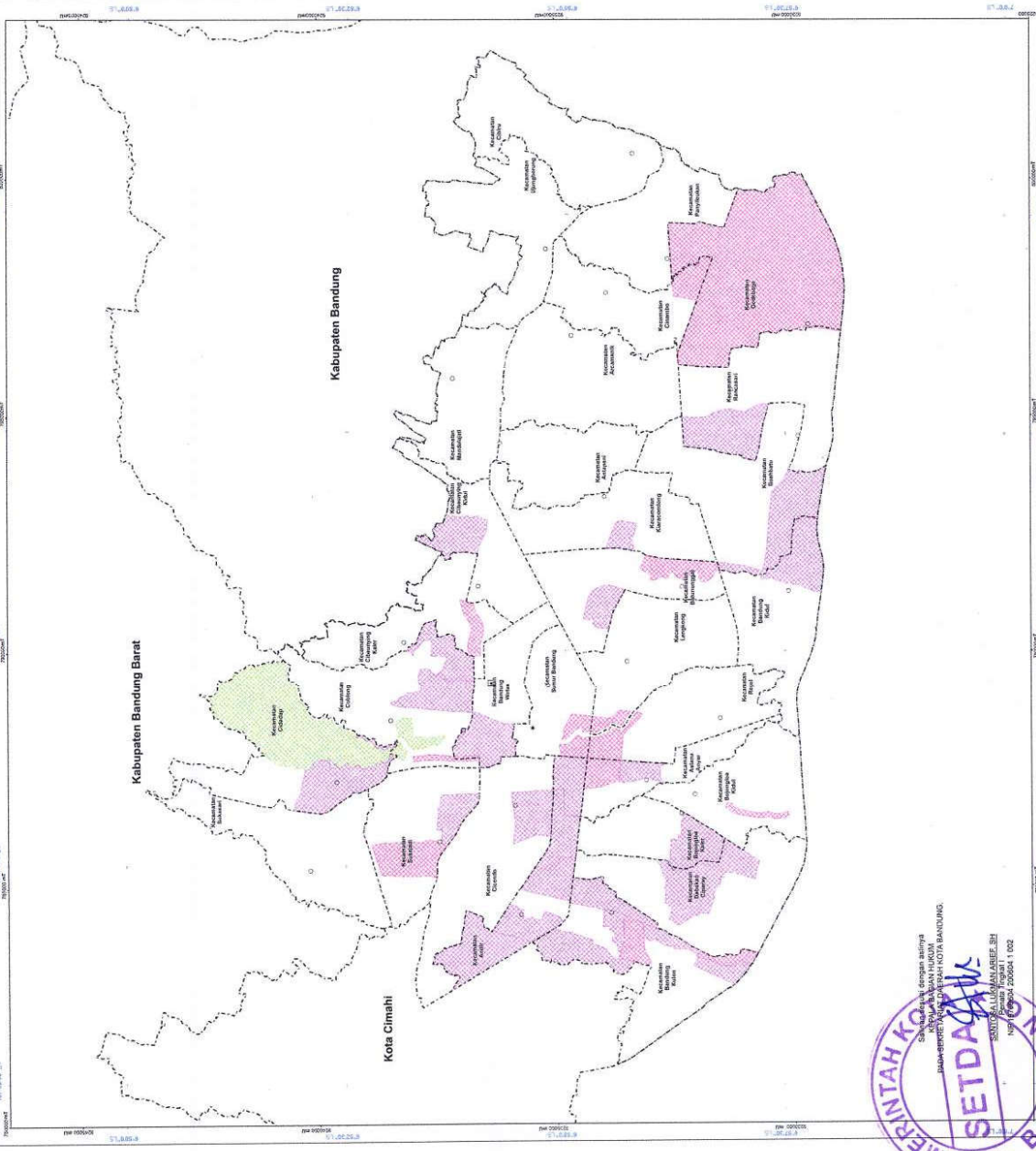
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA

SKALA: 1:40.000
 0 1 2 4 Km
 Universitas Transkeselebrator
 Dalam WRS Tahun 2022
 Georeferensi
 Datum Vertikal
 Datum Horizontal



KETERANGAN:
 - - - - Batas Administrasi
 - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - Batas Kecamatan
 ■ Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ● Ibu Kota Kecamatan

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
 Sifat Strategis
 Sifat Strategis
 Sifat dan Lainnya



SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
 1. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 2. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 3. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 4. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 5. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 6. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 7. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 8. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 9. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019
 10. Data Satah Sifat 7 Proklamasi tahun 2019

WALI KOTA BANDUNG
 TTD.
 YANA MULYANA



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN TAHAP PERTAMA

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG						
1.	Sistem Pusat Pelayanan						
	Penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung 2022-2042.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWK Bojonegara 2. SWK Cibeunying 3. SWK Tegalega 4. SWK Karees 5. SWK Kordon 6. SWK Arcamanik 7. SWK Ujungberung 8. SWK Gedebage 	APBD Kota	OPD Penataan Ruang Kota			
	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWK Bojonegara 2. SWK Cibeunying 3. SWK Tegalega 4. SWK Karees 5. SWK Kordon 6. SWK Arcamanik 7. SWK Ujungberung 8. SWK Gedebage 	APBD Kota	OPD Penataan Ruang Kota			
	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam rangka mewujudkan PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Alun-alun 2. PPK Gedebage 	APDB Kota, swasta	OPD Kesehatan, OPD Pendidikan, OPD Kebudayaan, OPD Perumahan, OPD Tata Ruang, OPD Perhubungan, OPD Pekerjaan Umum dan OPD terkait lainnya			
	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam rangka mewujudkan SPPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPK Setrasari 2. SPPK Pahlawan 3. SPPK Leuwipanjang 	APDB Kota, swasta	OPD Kesehatan, OPD Pendidikan, OPD Kebudayaan, OPD			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		<ul style="list-style-type: none"> 4. SPPK Malcer 5. SPPK Antapani 6. SPPK Ujungberung 7. SPPK Kordon 8. SPPK Derwati 		Permukiman, OPD Tata Ruang, OPD Perhubungan, OPD Pekerjaan Umum dan OPD terkait lainnya			
	Penyusunan RTBL PPK dan SPPK	<ul style="list-style-type: none"> 1. PPK Alur-alun 2. PPK Gedebage 3. SPPK Setrasari 4. SPPK Pahlawan 5. SPPK Leuwipanjang 6. SPPK Malcer 7. SPPK Antapani 8. SPPK Ujungberung 9. SPPK Kordon 10. SPPK Derwati 	APDB Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan	PPK Alur-alun	APDB Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage guna mendukung PPK Gedebage sebagai pusat aktivitas kota	PPK Gedebage	APDB Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK/ SPPK	<ul style="list-style-type: none"> 1. PPK Alur-alun 2. PPK Gedebage 3. SPPK Setrasari 4. SPPK Pahlawan 5. SPPK Leuwipanjang 6. SPPK Malcer 7. SPPK Antapani 8. SPPK Ujungberung 9. SPPK Kordon 10. SPPK Derwati 	APDB Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.	Sistem Jaringan Transportasi						
2.1	Sistem Jaringan Jalan						
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> 1. koridor 1 : Jalan Cibereum-Jalan Sudirman-Jalan Soekarno Hatta yang melintasi Terminal Leuwipanjang 2. koridor 2 : Jalan Rajawali Barat - Jalan Nurzamo - Jalan Abdul Rahman Saleh - Jalan Pajajaran (Simpang Abdul Rahman Saleh - Simpang Pasir Kaliki) - Jalan Pasir Kaliki (Simpang Kebon Kawung - Simpang Pasteur) yang mengakses Bandara Husein Sastranegara 	APBN	Kementerian PUPR			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
		<p>3. koridor 3 : Jalan Pasteur – Dr-Djunjunan - Jalan Layang Pasupati – Jalan Surapati, Jalan KHP Mustofa – Jalan Raya Sindanglaya – Jalan Raya Ujung Berung – Jalan Raya Cipadung – Jalan Cibiru</p> <p>4. koridor 4 : Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.</p>				
	Pemantapan dan pemeliharaan jalan kolektor primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Setiabudi; 2. Jalan Sukawangi; 3. Jalan Sukajadi; 4. Jalan Pasirkaliki (Simpang Pasteur-Simpang Sukejadi/Eyckman); 5. Jalan Pasirkaliki (Simpang Kebon Kawung-Simpang Pajajaran); 6. Jalan Kebon Kawung (Simpang Cicendo-Simpang Pasirkaliki); 7. Jalan Cicendo (Simpang Pajajaran-Simpang Kebonkawung); 8. Jalan Pajajaran (Simpang Pasirkaliki-Simpang Cicendo); 9. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranegara) 10. Jalan Terusan Pasir Koja (Simpang Jamika-Simpang Soekarno-Hatta); 11. Jalan Kopo (Simpang Jl. Peta – batas Kota/kab. Bandung) 12. Jalan Moh. Toha (Simpang Jl. BKR-BTS, Kota/Kab. Bandung); 13. Jalan Buah Batu (Simpang 4 Pelajar Pejuang 45-Simpang Soekarno Hatta); 14. Jalan Terusan Buah Batu (Simpang 4 Soekarno Hatta - Batas Kota/Kab. Bandung); 15. Jalan Peta; 16. Jalan BKR; 17. Jalan Pelajar Pejuang 45; 18. Jalan Laswi; 19. Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi-Simpang Supratman) 20. Jalan W.R. Supratman; 21. Jalan P. Diponegoro; 22. Jalan Cilmaya; 23. Jalan Cmandiri; 24. Jalan Depan LAN; 	APBD Provinsi	Dinas BMPR Prov. Jawa Barat		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
		<ul style="list-style-type: none"> 25. Jalan Cilaki; 26. Jalan Gasibu Barat; 27. Jalan Ariajipang; 28. Jalan Sentot Albasyah; dan 29. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-Simpang 3 Dervati-Batas Kota Bandung/ Jbt. Tol). 				
	Peningkatan jalan Kota menjadi jalan Provinsi dengan fungsi Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jalan Gedebage Naya; 2. Jalan Boeleward Utama; 3. Jalan Boeleward Barat; 4. Jalan Boeleward Selatan; 5. Jalan Cimincrang; dan 6. Jalan Pusedai. 	APBD Provinsi			
	Restrukturisasi dan pengembangan jalan arteri sekunder	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jalan Asia Afrika; 2. Jalan Gatot Subroto; 3. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Terusan Jakarta-Simpang Gatot Subroto); 4. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Gatot Subroto-Simpang Soekarno Hatta) 5. Jalan Braga; 6. Jalan Perintis Kemerdekaan; 7. Jalan Suniaraja (Simpang Braga-Simpang Perintis Kemerdekaan); 8. Jalan Wastukencana; 9. Jalan Pajajaran (Simpang Wastukencana-Simpang Cicendo); 10. Jalan Cihampelas; 11. Jalan Abdul Rivai; 12. Jalan Cpaganti; 13. Jalan Setiabudi (Simpang Sukawang-Simpang Cihampelas); 14. Jalan setiabudi (Simpang Ciumbuleuit) 15. Jalan Sindang Sirna; 16. Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami; 17. Jalan Leumah Neundeut; 18. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (Simpang Sutami-Simpang Leumah Neundeut); 19. Jalan LRE Martadinata (Simpang Wastukencana-Simpang Merdekaj); 20. Jalan Pasir Kaliki (Simpang Gardujati-Simpang Kebon Kawung); 21. Jalan Gardujati; 22. Jalan Pahlawan; 	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
		<p>23. Jalan Ir. Juanda; 24. Jalan Merdeka; 25. Jalan Lembong; 26. Jalan Tambong; 27. Jalan Oto Iskandar Dinata; 28. Jalan Leuwipanjang; 29. Jalan Kopo (Simpang BKR-Simpang Pasirkogej); 30. Jalan Pasirkogea; 31. Jalan Astanaanyar; 32. Jalan Sudirman; 33. Jalan Jamika; 34. Jalan Rumah Sakit; 35. Jalan Cinambo; 36. Jalan Cisaranten Kulon; 37. Jalan Cingised; 38. Jalan Cikajang Raya; 39. Jalan Cibatuk Raya; 40. Jalan Kuningan Raya 41. Jalan Arcamanik Endah Raya; 42. Jalan Pacuan Kuda; 43. Jalan Cwastra; 44. Jalan Sunda (Simpang Lengkong Kecil-Simpang Asia Afrika); 45. Jalan Sadakeing; Batu (Simpang Sadakeing-Simpang BKR); 46. Jalan Buah Batu (Simpang Sadakeing-Simpang BKR); 47. Jalan Karaptan (Simpang Cikawao/Sadakeing-Simpang Lengkong Kecil); 48. Jalan Jakarta 49. Jalan Sukabumi 50. Jalan Terusan Jakarta; 51. Jalan Golf Barat Raya; 52. Jalan Ahmad Yani (Simpang Asia Afrika-Simpang Laswi); dan 53. Jalan Ahmad Yani (Simpang Supratman-Simpang Sindanglaya)</p>				
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar SPPK	<p>1. Jalan Ciumbuleuit (Simpang Setiajadi – Simpang Siliwangi); 2. Jalan Siliwangi; 3. Jalan Dipatiukur; 4. Jalan Tubagus Ismail; 5. Jalan Sadang Serang; 6. Jalan Cikutra Barat; 7. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri;</p>	APBD Kota, swasta	OPD Pekerjaan Umum Kota OPD Penataan Ruang Kota		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN 2022	WAKTU PELAKSANAAN 2023	WAKTU PELAKSANAAN 2024
		<p>8. Jalan Pandu; 9. Jalan Arjuna; 10. Jalan Kebon Jati; 11. Jalan Suniaraja; 12. Jalan LRE Martadinata (Simpang Merdeka-Simpang A. Yani); 13. Jalan Rajawali Timur; 14. Jalan Mohamad Ramdan; 15. Jalan Karaptan (Simpang Moh. Ramdan-Simpang Cikawao/Sadakeling); 16. Jalan Gurame; 17. Jalan Cikutra; 18. Jalan H. Ibrahim Ajie (Simpang A. Yani-Simpang Terusan Jakarta); dan 19. Jalan Brigien Katamsa.</p>					
	Pembangunan jalan layang/ simpang susun/perlintasan tidak sebidanag	<p>1. Simpang susun jalan Soekarno-Hatta – Jalan Moch. Toha; 2. Simpang susun jalan Soekarno-Hatta – Jalan Buahbatu; 3. Simpang susun jalan Soekarno-Hatta – Jalan Ibrahim Adijie; 4. Simpang susun jalan Gedebage – jalan tol Padaleunyi; 5. Simpang susun jalan Dr. Setiabudhi – Jalan Sersan Bajuri; 6. Simpang susun Jalan Padjajaran – Jalan Pasirkaliki 7. Simpang susun Jalan Dr. Djuunduman – jalan Surya Sumantri; 8. Perlintasan tidak sebidang Jalan Nuritano – rel KA; 9. Perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna – rel KA; 10. Perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurrahman Saleh – rel KA; 11. Perlintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani – rel KA; 12. Perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda – rel KA; 13. Perlintasan tidak sebidang Jalan Braga – rel KA; 14. Simpang susun/perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.</p>	APBN	Kementerian PUPR			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pemeliharaan simpang susun/perlintasan tidak sebidang pada	<ol style="list-style-type: none"> simpang susun Jl. Soekarno-Hatta – Jl. KH. Hasyim Ashari (Jl. Kopo); simpang susun jalan Soekarno-Hatta – Jalan Cibaduyut; simpang susun Jalan Supratman – Jalan Jakarta; simpang susun Jalan Laswi – Jalan Caiot Subroto; simpang susun Jalan Terusan Jakarta; dan simpang susun/perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada 					
	Pembangunan jalan tol dalam kota	Jalan tol dalam kota Utara – Selatan yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol dalam kota Terusan Pasteur – Ujungberung	APBN, Swasta	Kementerian PUPR			
	Pemeliharaan jalan tol	<ol style="list-style-type: none"> Jalan Tol Sorang – Pasirkoja Jalan Tol Padalarang – Cileunyi 	APBN	Kementerian PUPR			
	Pemeliharaan dan pengembangan Terminal tipe A	<ol style="list-style-type: none"> Terminal Leluwipanjang di Kecamatan Bojongboea Kidul Terminal Cicaheum di Kecamatan Kiaracondong 	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan			
	Pengajuan Usulan pembangunan Terminal Tipe A	Terminal Tipe A Gedebage	APBN, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, OPD Perhubungan Kota			
	Pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B	<ol style="list-style-type: none"> Terminal Ledeng Terminal St. Hall Terminal Ciryom 	APBD Provinsi	OPD Perhubungan Provinsi			
	Pemeliharaan dan pengembangan Terminal tipe C	<ol style="list-style-type: none"> Terminal Sederhana di Kecamatan Sukajadi; Terminal Dago di Kecamatan Coblong; Terminal Sadang Serang di Kecamatan Coblong; Terminal Abdul Muis di Kecamatan Regol; Terminal Cibaduyut di Kecamatan Bojongboea Kidul; Terminal Tegalega di Kecamatan Astananyar; Terminal Antapani di Kecamatan Antapani; Terminal Civastra di Kecamatan Kancasari; 	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023
		9. Terminal Ujung Berung di Kecamatan Ujung Berung 10. Terminal Margahayu di Kecamatan Buahbattu; 11. Terminal Ritung Bandung di Kecamatan Gedebage; 12. Terminal Gedebage di Kecamatan Panyileukan; 13. Terminal Cibiru di Kecamatan Panyileukan; 14. Terminal Caringin di Kecamatan Bojongloa Kaler; 15. Terminal Kebon Kelapa di Kecamatan Regol; dan 16. Terminal Kordon di Kecamatan Buahbattu.				
	Pengembangan angkutan umum massal berbasis bus	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Peningkatan kualitas angkutan umum: pengumpulan (<i>feeder</i>)	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Pengembangan aplikasi sistem transportasi terpadu	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Penertiban dan peningkatan fungsi halte	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan Kota		
	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya.	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.2	Sistem Jaringan Kereta Api					
	Pengembangan dan/atau pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota	1. Jalur kereta api <i>double track</i> -Jawa Selatan yang menghubungkan	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan,		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		Padalarang – Bandung – Bandar – Yogyakarta 2. Jalur kereta api berkecepatan tinggi (<i>high speed train</i>) Jakarta – Bandung Kota Bandung	APBN, Swasta	PT. KAI Kementerian Perhubungan, PT. KAI			
	Pengembangan dan peningkatan jaringan KA perkotaan yang sudah berjalan; Reaktivasi jalur kereta api perkotaan	Jalur Kiaracondong-Ciwidey	APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perhubungan, OPD Perhubungan Provinsi , PT KAI			
	Peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api	1. Stasiun Bandung 2. Stasiun Cimindi 3. Stasiun Ciroyom 4. Stasiun Andir 5. Stasiun Cikudapateuh 6. Stasiun Kiaracondong 7. Stasiun Cibangkong/or 8. Stasiun Gedebage	APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perhubungan, OPD Perhubungan Provinsi , PT KAI			
2.3	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus						
	Pencetakan kawasan aman bagi jalur penerbangan pada KKOP dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandara sesuai ketentuan yang berlaku	KKOP Bandara Husein Sastranegara	APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perhubungan, Danlanud Husein Sastranegara			
	Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan intermasional dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara	Bandara Husein Sastranegara	APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perhubungan, Danlanud Husein Sastranegara, OPD Perhubungan Provinsi, OPD Perhubungan Kota			
	Peningkatan pelayanan moda transportasi umum	Bandara Husein Sastranegara	APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perhubungan, Danlanud Husein Sastranegara, OPD, Perhubungan Provinsi, OPD Perhubungan Kota			
3.	Sistem Jaringan Energi						
	Pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi SUTT dan SKTT	1. SUTT yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kidul,	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT, PLN			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		<p>Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadak, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Ujungberung</p> <p>2. Satuan transmisi lainnya berupa SKTT yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astananyar, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Sumur Bandung, dan Kecamatan Ujungberung</p>					
	Pemeliharaan dan peningkatan Gardu Induk	<ol style="list-style-type: none"> 1. GI Bandung Utara di Kecamatan Sukasari; 2. GI Bengkok di Kecamatan Coblong; 3. GI Braga di Kecamatan Sumur Bandung; 4. GI Cigareleng di Kecamatan Regol; 5. GI Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong; 6. GI Bandung Timur; 7. GI Gedebage di Kecamatan Gedebage; 8. GI Bengkok/Dago II, Kota Bandung 	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN			
	Peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik;		APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN			
	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik yang meliputi jaringan SUTM dan SKTM	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUTM yang melintasi Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadak, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan 	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Ujungberung; 2. SKTM yang tersebar di seluruh kecamatan					
	Pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah	Kota Bandung	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN			
	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik yang meliputi jaringan SUTR dan SKTR	1. SUTR yang tersebar di seluruh kecamatan 2. SKTR di Kota Bandung	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN			
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi						
	Pengembangan jaringan serat optik	Kota Bandung	swasta	swasta			
	Pemeliharaan dan pengembangan STO	Kota Bandung	APBN, swasta	APBN, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi			
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Komunikasi dan Informasi Kota; OPD Pekerjaan Umum; OPD Penataan Ruang OPD Permukiman/Cipta Karya			
	Peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Komunikasi dan Informasi Kota; Swasta.			
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
	Pengendalian pencemaran air	Sungai di DAS Citarum Kota Bandung	APBD Kota	BBWS OPD Lingkungan Hidup Provinsi OPD Lingkungan Hidup Kota			
	Penataan wilayah sungai dalam menjaga kawasan resapan terintegrasi dengan DAS Citarum	Sungai Cidanau- Ciujung- Cidurian- Cisdance- Cihwung- Citarum	APBD Provinsi/Kota	Kementerian Lingkungan Hidup, OPD Lingkungan Hidup Provinsi, OPD Lingkungan Hidup Kota			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pemeliharaan dan pengembangan bangunan pengendali banjir berupa kolam retensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam retensi Taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan 2. Kolam retensi Sarimas di Kecamatan Arcamanik 3. Kolam retensi Simaraga di Kecamatan Cicendo 4. Kolam retensi Kandangpuspa di Kecamatan Bandung Wetan 5. Kolam retensi Rancabolang di Kecamatan Gedebage 6. Kolam retensi Cisarupan di Kecamatan Cibiru 7. Kolam retensi Jalan Bima di Kecamatan Cicendo 8. Kolam retensi Gedebage di Kecamatan Panyileukan 	APBD Kota, Swasta	OPD Pekerjaan Umum Kota			
	Pengembangan wetland	Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum			
	Pembangunan kolam retensi / Ruang Terbuka Biru (RTB) yang terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wilayah resapan air	PPK Gede Bage	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota, OPD Lingkungan Hidup Kota OPD Penataan Ruang Kota, OPD Perumahan dan Permukiman Kota			
	Penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m dan berfokus pada kawasan dengan tingkat kritis yang tinggi	Kota Bandung	APBD Provinsi/Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota OPD Penataan Ruang Kota, OPD Perumahan dan Permukiman Kota			
	Peningkatan kualitas danau buatan	Kecamatan Gedebage	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pengendalian pemanfaatan air pada kawasan CAT yang sudah kritis	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
6.	Infrastruktur Perkotaan						
6.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
	Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum Kota Bandung	Kota Bandung	APBD Kota	Bappelitbang, OPD Penataan Ruang,			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Optimalisasi pasokan air baku dari sumber air yang ada dan pengembangan sumber air baku lainnya	Kota Bandung	APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan dan Permukiman PDAM, OPD Lingkungan Hidup, OPD Pekerjaan Umum			
	Optimalisasi dan rehabilitasi unit produksi	IPA Badaksinga, IPA Dago Pakar, IPA Cibereum, Miniplant Dago Pakar, Miniplant Cibereum, Miniplant Cipanjalu, dan Miniplant Cirateun	APBD Kota, Swasta	PDAM			
	Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM			
	Pemanfaatan sumber air permukaan	Sungai Cikapundung, Sungai Cibereum, Sungai Cipaganti, Sungai Cipanjalu, Danau buatan Gedebage;	APBD Kota, Swasta	PDAM			
	Pemeliharaan dan peningkatan cakupan pelayanan air minum	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM			
	Penurunan tingkat kebocoran air	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM			
	Penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	PDAM, OPD Lingkungan Hidup, OPD Pekerjaan Umum			
	Pengembangan bauran air domestik	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM, OPD Lingkungan Hidup, OPD Pekerjaan Umum			
	Pengembangan kerjasama SPAM regional		APBN/APBD Provinsi/Kota	Bappelitbang, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan dan Permukiman, PDAM, OPD Pekerjaan Umum			
6.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)						
	Penyusunan rencana induk sistem pengolahan air limbah Kota Bandung	Kota Bandung	APBD Kota	Bapelitbang; OPD Pekerjaan Umum			
	Optimalisasi dan Pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM, OPD Lingkungan Hidup OPD Pekerjaan Umum			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
	Pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh	Kota Bandung	APBD Kota	PDAM OPD Perumahan/ Permukiman Kota		
	Revitalisasi SPAL Bojongsong	Kabupaten Bandung	APBN/APBD Kota	PDAM		
	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik	Kota Bandung	APBN/APBD Provinsi/Kota	PDAM OPD Perumahan/ Permukiman Kota OPD Lingkungan Hidup		
	Pengembangan IPAL komunal	Cipamokolan, Ujungberung, dan lokasi lainnya sesuai kebutuhan;	APBD Provinsi/Kota	PDAM OPD Perumahan/ Permukiman Kota OPD Lingkungan Hidup		
6.3	Sistem Jaringan Persampahan					
	Penyusunan Rencana Induk Pengolahan Sampah Kota Bandung	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota		
	Pembangunan dan pengembangan TPS 3R di setiap PPL	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota		
	Optimalisasi pemanfaatan TPPAS Sarimukti		APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota		
	Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan sampah regional di TPPAS Sarimukti dan Legok Nangka	Kabupaten Bandung	APBD Provinsi, swasta	OPD Lingkungan Hidup Provinsi, OPD Lingkungan Hidup Kota		
	Pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Kerja Sama Daerah Kota		
	Pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota		
	Pembangunan TPA Gedebage	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota		
6.4	Sistem Drainase					
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase	Kota Bandung	APBD Kota	Bappelitbang, OPD Penataan Ruang OPD Pekerjaan Umum		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Cibeureum 2. Sungai Cikapundung 3. Sungai Cipamokolan 4. Sungai Cidurian 5. Sungai Cicadas 6. Sungai Citerpus 7. Sungai Cisaranten 8. Sungai Cinambo 9. Sungai Cibenunying 10. Sungai Ciparay 11. Sungai Cirangrang 12. Sungai Cibodas 13. Sungai Cibogo 14. Sungai Cigondewah 15. Sungai Cijalupang 16. Sungai Cikadu 17. Sungai Cikakak 18. Sungai Cikalintu 19. Sungai Cikapayang 20. Sungai Cikendal 21. Sungai Cikeuteus 22. Sungai Cikiley 23. Sungai Cipaganti 24. Sungai Cipanjalu 25. Sungai Ciryom, dan 26. Sungai Citarum. 	APBD Provinsi	BBWS			
	Pengembangan sistem drainase sekunder dan tersier yang terintegrasi	Kota Bandung	APBD Kota swasta	OPD Pekerjaan Umum Kota			
	Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase	Kota Bandung	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota			
	Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis;	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota			
	Penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu, dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota			
6.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana						
	Pemeliharaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana skala kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Tegalega di Kecamatan Regol 2. Gelora Bandung Lautan Api di Kecamatan Gedebage 3. Taman Gasibu di Kecamatan Bandung Wetan 4. Alun-Alun Kota di Kecamatan Regol 5. Sasana Budaya Ganestha di Kecamatan Coblong 	APBD Kota	OPD Penanggulangan Bencana Kota OPD Pekerjaan Umum Kota OPD Perumahan/Permukiman			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pengembangan dan peningkatan kapasitas jalur evakuasi utama	<p>6. Lapangan Olahraga Arcamamik di Kecamatan Arcamamik</p> <p>7. Lapangan olah raga dan taman kota lainnya</p> <p>1. Jalan Soekarno Hatta;</p> <p>2. Jalan Peta;</p> <p>3. Jalan Pelajar Pejuang 45;</p> <p>4. Jalan EKK;</p> <p>5. Jalan Pasirkoja;</p> <p>6. Jalan Terusan Pasirkoja;</p> <p>7. Jalan Gedebage;</p> <p>8. Jalan Cimencrang;</p> <p>9. Jalan Tol Dalam Kota;</p> <p>10. Jalan Sejar-Tol;</p> <p>11. Jalan Tol Purbatunyi;</p> <p>12. Jalan Ir. H. Juanda;</p> <p>13. Jalan Siliwangi;</p> <p>14. Jalan Cisitau;</p> <p>15. Jalan Cumbuleuit;</p> <p>16. Jalan Setiaбудhi;</p> <p>17. Jalan Dipatiukur;</p> <p>18. Jalan P.H.H Mustofa;</p> <p>19. Jalan A.H Nasution;</p> <p>20. Jalan layang Pasupati;</p> <p>21. Jalan Dr. Djundjuman;</p> <p>22. Jalan Ciampelas;</p> <p>23. Jalan Sukaregara;</p> <p>24. Jalan Cikapayang;</p> <p>25. Jalan Asia Afrika;</p> <p>26. Jalan Braga;</p> <p>27. Jalan Buah Batu;</p> <p>28. Jalan Terusan Buah Batu;</p> <p>29. Jalan Dipatiukur;</p> <p>30. Jalan Gatot Subrata;</p> <p>31. Jalan Golf Barat Raya;</p> <p>32. Jalan Pasirkaiki;</p> <p>33. Jalan Ibrahim Adji;</p> <p>34. Jalan Jakarta;</p> <p>35. Jalan Jamika;</p> <p>36. Jalan Ahmad Yani;</p> <p>37. Jalan Jenderal Sudirman;</p> <p>38. Jalan Raya Cibeureum;</p> <p>39. Jalan Kesehatan;</p> <p>40. Jalan Laskar Wanita Indonesia;</p> <p>41. Jalan Layang Antepanti;</p> <p>42. Jalan Mochammad Toha;</p>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUJPR ENPB, OPD Penataan Ruang Provinsi, OPD Penanggulangan Bencana Provinsi OPD Penanggulangan Bencana Kota, OPD Pekerjaan Umum Kota			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		43. Jalan Otto Iskandar Dinata; 44. Jalan Prabudimuntur; 45. Jalan Cibiru-Cileunyi; 46. Jalan Raya Kopo; 47. Jalan Sukabumi; 48. Jalan Sukajadi; 49. Jalan Surapati; dan 50. Jalan Terusan Jakarta.					
	Pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Penanggulangan Bencana Kota OPD Pekerjaan Umum Kota OPD Perumahan/Permukiman			
	Pengembangan sistem pengurangan risiko bencana	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Penanggulangan Bencana Kota			
B	PERWUJUDAN POLA RUANG						
1.	Perwujudan Kawasan Lindung						
1.1	Kawasan Perlindungan Setempat						
	Pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai	Sempadan Sungai Cikapundung, Sungai Cikadu, Sungai Ciregol, Sungai Cidurian, Sungai Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo, dan Sungai Cipanjalu	SPBN	BBWS			
	Pelestarian kawasan kearifan lokal	Kawasan Perindungan Burung Blekok di Kecamatan Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Lingkungan Hidup, OPD Kebudayaan			
	Rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kota Bandung	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum Kota			
1.2	Ruang Terbuka Hijau						
	Pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan Rimba Kota	1. Hutan kota Babakan Siliwangi di Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Coblong; 2. Taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan; 3. Taman Kandang Puspa di Kecamatan Bandung Wetan; 4. Taman Pet Park di Kecamatan Bandung Wetan; 5. Taman Mahuku di Kecamatan Bandung Wetan;	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Eks TPA Pasir Impun di Kecamatan Mandalajati; dan 7. Eks TPA Cicabe di Kecamatan Mandalajati; 8. Kebun Binatang Bandung di Kecamatan Sumur Bandung; dan 9. Taman Kehati di Kecamatan Cibiru 10. Rimba kota lainnya yang tersebar di Kecamatan Cidadak, Kecamatan Cobleng, dan Kecamatan Cibeunying Kaler 	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/ Permukiman			
	Pemeliharaan dan penataan taman-taman Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Alun-alun Bandung di Kecamatan Regol; 2. Taman Tegalega di Kecamatan Regol; 3. Taman Cibeunying di Kecamatan Bandung Wetan; 4. Taman Sukajadi di Kecamatan Sukajadi; 5. Taman Lalihintas di Kecamatan Sumur Bandung; 6. Taman Pramuksa di Kecamatan Bandung Wetan; 7. Taman Panatayuda di Kecamatan Cobleng; 8. Taman Alun-alun Ujung Berung di Kecamatan Ujung Berung; 9. Taman Alun-alun Cicendo di Kecamatan Cicendo; dan 10. Taman kota di Kecamatan Gedebage 	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/ Permukiman			
	Pemeliharaan dan penataan taman-taman Kecamatan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/ Permukiman			
	Pemeliharaan dan penataan taman pemakaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPU Ciburunay di Kecamatan Sukasari 2. TPU Pandu di Kecamatan Cicendo 3. TPU Sitraraga di Kecamatan Cicendo 4. TPU Astanayanar di Kecamatan Astanayanar 5. TPU Babakan Ciparay di Kecamatan Babakan Ciparay 6. TPU Cikutra di Kecamatan Cibeunying Kaler 7. TPU Cikadut di Kecamatan Mandalajati 8. TPU Nagrog di Kecamatan Ujungberung 	APBD Kota	OPD Pemakaman			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
		9. TPU Maleer/ Cibangkong di Kecamatan Batununggal 10. TPU Gumuruh di Kecamatan Batununggal 11. TPU Ranceacili di Kecamatan Rancasari 12. TPU Legok Cisureuh di Kecamatan Regol 13. TPU Ciburuy di Kecamatan Cinambo 14. TPU lainnya				
	Pengembangan taman-taman pada Jalur Hijau	a. Kecamatan Andir; b. Kecamatan Antapani; c. Kecamatan Arcamanik; d. Kecamatan Astamanyar; e. Kecamatan Babakan Ciparay; f. Kecamatan Bandung Kidul; g. Kecamatan Bandung Kulon; h. Kecamatan Bandung Wetan; i. Kecamatan Batununggal; j. Kecamatan Bojongloa Kaler; k. Kecamatan Bojongloa Kidul; l. Kecamatan Buahbatu; m. Kecamatan Cibeunying Kaler; n. Kecamatan Cicendo; o. Kecamatan Cidatapp; p. Kecamatan Cinambo; q. Kecamatan Coblong; r. Kecamatan Gedebage; s. Kecamatan Kiaracondong; t. Kecamatan Lengking; u. Kecamatan Panyileukan; v. Kecamatan Rancasari; w. Kecamatan Regol; x. Kecamatan Sulejadi; y. Kecamatan Sukasari; dan z. Kecamatan Sumur Bandung.	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/ Permukiman		
	Intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10-20% untuk tiap kavling bangunan, roof garden, wall garden	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup, OPD Perumahan/ Permukiman, OPD Pertanian/Pangan		
	Pemanfaatan lahan terlantar publik	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Aset Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/ Permukiman		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pemulihan kembali ruang terbuka	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman			
	Penyerahan PSU Perumahan	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman			
	Inventarisasi aset Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Asest Kota			
	Peningkatan kontribusi penyediaan lahan untuk pemakaman dari pengembang Perumahan	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Pemakaman			
	Pengembangan jalur hijau jalan	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman, OPD Lingkungan Hidup, OPD Pekerjaan Umum,			
	Pengadaan lahan untuk RTH publik	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Aset Kota, OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman			
	Pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan/gedung	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang; Permukiman;			
	Rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup			
1.3	Kawasan Pelestarian Alam						
	Mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas kawasan hutan	Taman Hutan Raya Jr. H. Djuanda	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dishut Prov.			
1.4	Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung						
	Meminimalisasi dampak perubahan tutupan lahan terhadap emisi karbon untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pekerjaan Umum; OPD Penataan Ruang; OPD Perumahan/Permukiman			
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya						
2.1	Kawasan Permukiman						
2.1.1	Kawasan Perumahan						
				OPD Lingkungan Hidup			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pengembangan kawasan Perumahan dengan konsep hunian berimbang	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman			
	Pengembangan baru kawasan Perumahan yang diarahkan pada wilayah Bandung Timur	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Pengendalian Perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di Kawasan Bandung Utara	1. Kecamatan Sukasari, 2. Kecamatan Sukajadi, 3. Kecamatan Cicendo, 4. Kecamatan Andir, 5. Kecamatan Bandung Kulon, 6. Kecamatan Bojongloa Kidul, 7. Kecamatan Regol, 8. Kecamatan Babakan Ciparay, 9. Kecamatan Bojong Kaler, 10. Kecamatan Astana Anyar 11. Kecamatan Lengkong, 12. Kecamatan Sumur Bandung, 13. Kecamatan Buah Batu, 14. Kecamatan Batununggal, 15. Kecamatan Kiaracondong, 16. Kecamatan Antapani, dan 17. Kecamatan Cibeunying Kidul	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang kapasitas prasarannya terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah di Kawasan Bandung Utara	1. Kecamatan Sukasari, 2. Kecamatan Sukajadi, 3. Kecamatan Cicendo, 4. Kecamatan Andir, 5. Kecamatan Bandung Kulon, 6. Kecamatan Bojongloa Kidul, 7. Kecamatan Regol, 8. Kecamatan Babakan Ciparay, 9. Kecamatan Bojong Kaler, 10. Kecamatan Astana Anyar 11. Kecamatan Lengkong, 12. Kecamatan Sumur Bandung, 13. Kecamatan Buah Batu, 14. Kecamatan Batununggal, 15. Kecamatan Kiaracondong, 16. Kecamatan Antapani, dan 17. Kecamatan Cibeunying Kidul	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Mempertahankan Perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan Perumahan villa dan kawasan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alun-alun, 2. Asia Afrika, 3. Braga, 4. Jl. Kelenjung, 5. Jl. Pasar Baru, 6. Jl. Otto Iskandardinata, 7. Jl.ABC, 8. Kawasan Pecinan, 9. Jl. Karaptan, 10. Jl. Dewi Sartika, 11. Jl. Melong, 12. Jl. Dipatiukur, 13. Jl.Ir.H.Djuanda, 14. Jl. Ganesha, 15. Jl. Pager Gunung, 16. Jl. Tamansari, 17. Jl. Diponegoro, 18. Jl. R. Martadinata, 19. Jl. Cipayanti, 20. Jl. Pasteur, 21. Jl. Setiabudi, 22. Jl. Gatot Subroto, 23. Jl. Malabar, 24. Jl. Ariuna, 25. Jl. Jatayu 26. Jl. Kebon Jati, 27. Jl. Sumatera, 28. Jl. Jawa, 29. Jl. Aceh, 30. Jl. Bali, 31. Kawasan Gudang Pertahanan keamanan, 32. Jl. Sasakgantung 	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Kebudayaan			
	Pembatasan pembangunan kawasan Perumahan di Kawasan Bandung Utara.	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Penyediaan Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan Perumahan vertikal	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Penanganan kawasan kumuh	Kota Bandung	APBN, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Pendidikan, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Pendidikan, OPD Penataan Ruang			
	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bandung	APBN, APBD Kota, Swasta	OPD Kesehatan			
	Pembangunan RS tipe A	Kota Bandung	APBN, APBD Kota, Swasta	OPD Kesehatan, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	Bagian Kesra, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum			
	Pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda (<i>park and ride</i>) yang terintegrasi;	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perhubungan, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir, dan sejenisnya	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perhubungan, OPD Penataan Ruang			
	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Pemuda dan Olah raga			
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka non-hijau	Kota Bandung	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum			
	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Lingkungan Hidup			
	Pemeliharaan dan penataan kawasan Gardu Induk	Kota Bandung	PLN	PLN			
2.1.2	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial						
	Pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal di Wilayah Bandung Barat	Wilayah Bandung Barat	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Pendidikan Kota			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023
	Pembatasan pengembangan perguruan tinggi di Wilayah Bandung Barat	Wilayah Bandung Barat	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Pendidikan Kota		
	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Kesehatan Kota		
	Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Tipe A di bagian Timur Kota.	Wilayah Bandung Timur	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Kesehatan Kota, Bappelitbang		
	Optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perumahan/Permukiman		
	Optimalisasi sarana dan prasarana transportasi	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perhubungan		
2.1.3	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau					
	Intensifikasi, ekstensifikasi, penataan, peningkatan fungsi dan pemeliharaan RTNH	Kota Bandung	APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, OPD Perumahan/Permukiman		
2.1.4	Kawasan Infrastruktur Perkotaan					
	Pengembangan TPA Gedebage	Kecamatan Gedebage	APBD Kota, Swasta	OPD Lingkungan Hidup		
	Pengembangan dan pemeliharaan Kawasan GI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan GI Bandung Utara di Kecamatan Sukasari; 2. Kawasan GI Bengkok di Kecamatan Cobleng; 3. Kawasan GI Braga di Kecamatan Sumur Bandung; 4. Kawasan GI Cigareleng di Kecamatan Regol; 5. Kawasan GI Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong; 6. Kawasan GI Gedebage di Kecamatan Gedebage; 7. Kawasan GI Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik; dan 8. Kawasan GI Bengkok/Dago II di Kecamatan Cobleng 	APBN, swasta	Kementerian ESDM, PT, PLN		
2.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
	Pengembangan baru kegiatan jasa di wilayah Bandung Timur	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
	Pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan jasa di wilayah Bandung Barat	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pembangunan kembali kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroym, dan pasar khusus lainnya	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Peningkatan pengembangan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang, PD Pasar		
	Relokasi pasar lingkungan perumahan/kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTP;	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat	Wilayah Bandung Barat	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
	Pengaturan ketentuan batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan ruang publik	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perdagangan, OPD Penataan Ruang		
2.3	Kawasan Perkantoran					
	Penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi, dan kota yang sudah berkembang	Kota Bandung	APBN APBD Propinsi, APBD Kota,	OPD Penataan Ruang		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan inti pusat kota	Wilayah Bandung Barat	APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Penataan Ruang, OPD Lingkungan Hidup, OPD Perumahan/Permukiman			
2.4	Kawasan Perumahan Industri						
	Optimalisasi kawasan industri strategis nasional	1. PT Pindad 2. PT Dirgantara	APBN	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perhubungan			
	Mengembangkan industri kecil pada sentra-sentra industri kecil	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian			
	Memperhatikan industri kecil yang ada di lingkungan Perumahan	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian			
	Penataan kawasan pada sentra-sentra industri kecil	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian, OPD Penataan Ruang			
	Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra-sentra industri kecil	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian			
	Revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil	Kota Bandung	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian			
	Penetapan lokasi dan pengembangan sentra industri rumah	1. Sentra industri Suci 2. Sentra industri Cigondewah; 3. Sentra industri Sukamulya 4. Sentra industri Binongjati; 5. Sentra industri Cibaduyut; 6. Sentra industri Cibuntu 7. Sentra industri potensial lain yang dikembangkan	APBD Kota, Swasta	OPD Perindustrian, OPD Penataan Ruang, OPD Pariwisata			
	Pengendalian pembangunan industri besar baru;	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Perindustrian, OPD Penataan Ruang			
2.5	Kawasan Pariwisata						
	Pengembangan rencana induk pariwisata kota	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pariwisata			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
	Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah	Kota Bandung	APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Kebudayaan		
	Mengembangkan dan mempertahankan wisata alam, wisata pendidikan dan wisata budaya kota	Kota Bandung	APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Kebudayaan OPD Pariwisata		
	Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan Perumahan	Kota Bandung	APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	OPD Pariwisata OPD Penataan Ruang		
	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendorong pariwisata	Kota Bandung	APBD Kota, swasta	OPD Pariwisata		
	Pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur	Kota Bandung	APBD Kota, swasta	OPD Pariwisata OPD Penataan Ruang		
2.6	Kawasan Pertanian					
	Penetapan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Ujungberung Kecamatan Cibiru	APBD Kota	OPD Pertanian/Pangan		
	Peningkatan fasilitas pertanian pada lahan pertanian pangan	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pertanian/Pangan		
	Pengembangan pertanian perkotaan (<i>urbani farming</i>)	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pertanian/Pangan		
	Pengembangan lahan sawah abadi	Kota Bandung	APBD Kota	OPD Pertanian/Pangan		
2.7	Kawasan Transportasi					
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi	1. Kawasan Terminal Leuwipanjang; 2. Kawasan Terminal Cicaheum; 3. Kawasan Terminal Ledeng; 4. Kawasan Terminal Ciroyom; 5. Kawasan Terminal St. Hall; 6. Kawasan stasiun kereta api	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, OPD Perhubungan Provinsi, PT KAL		
	Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi	1. Kawasan Terminal Leuwipanjang; 2. Kawasan Terminal Cicaheum; 3. Kawasan Terminal Ledeng; 4. Kawasan Terminal Ciroyom; 5. Kawasan Terminal St. Hall; 6. Kawasan stasiun Kereta api	APBD Prov/Kota	OPD Perhubungan Provinsi, OPD Perhubungan Kota		
	Penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (<i>park and ride</i>) yang terintegrasi;	Kota Bandung	APBD Prov/Kota	OPD Perhubungan Provinsi, OPD Perhubungan Kota		
2.8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
	Mempertahankan perkantoran dan instansi pertahanan dan keamanan	a. Lanud Husein Sastranegara; b. Kodam III/Siliwangi; c. Kodim 0618/BS;	APBN	Kementerian Pertahanan Keamanan		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN 2022	2023	2024
		<p>d. Den Interdam; e. Topdam; f. Kudam; g. Babinninwetcaudam h. Jasda; i. Binaldam; j. Kumdam; k. Paldam; l. Gudpalrah A.01; m. Rindam; n. Ayerdam; o. Satsikmil Tipe B; p. Pomdam; q. Kesdam; r. Denkeslap 03.03.01 s. Zidam; t. Hubdam; u. Bekangdam; v. Den Ang III-44-13; w. Yon Arh-3; x. Yon Kav-4/Tank y. Gupusmu I Ditpalad; z. Ku. Pus II Ditkuad; aa. Kodiklat TNI AD; bb. Puserarif; cc. Pusdikku; dd. Pusdikturni; ee. Se capa AD; ff. SESKOAD; gg. SESKO TNI; hh. Dislitbang AD; ii. Dispsi AD jj. Coklit Ditkuad kk. Ditafenad ll. Laf AD Disksesad mmm. Lanal Bandung nn. Denmadam oo. Bengerah A.01 pp. Rumkit TK. IV 03.07.02; qq. Disjarah; rr. Gudkesrah 03.02.01; ss. Pusen Kav; tt. Pusenpur; dan uu. Mese Angkatan Laut</p>					

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan dan keamanan	Kota Bandung	APBN	Kementerian Pertahanan Keamanan			
	Pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan	Kota Bandung	APBN	Kementerian Pertahanan Keamanan			
	Pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara	Kota Bandung	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, OPD Provinsi/Kota, Lamud Husein Sastranegara			
3.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS						
a.	Perwujudan kawasan berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya dan ekonomi						
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	PPK Alun-alun, PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan dan Bangunan		APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
b.	Perwujudan kawasan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi						
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Penyusunan Pedoman Pembangunan	PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Penyusunan Pedoman Investasi	PPK Gedebage	APBD Kota	Bappelitbang, OPD Perizinan Terpadu, OPD Perencanaan Kota			
c.	Perwujudan kawasan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup						
	Penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Babakan Siliwangi	Babakan Siliwangi	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Puncut	Kawasan Puncut	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
d.	Perwujudan kawasan berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya						
	Penyusunan rencana pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	a. Kelurahan Cempaka, Kelurahan Cirayom, Kelurahan Dunguscariang, Kelurahan Maleber, dan Kelurahan Kebon Jeruk di Kecamatan Andir; b. Kelurahan Sukabungah di Kecamatan Sukajadi;	APBD Kota	OPD Perumahan/Perumahan			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
		<p>c. Kelurahan Sukapada di Kecamatan Cibenyung Kidul;</p> <p>d. Kelurahan Hegarmanah di Kecamatan Cidadak;</p> <p>e. Kelurahan Rancabolang di Kecamatan Gedebage;</p> <p>f. Kelurahan Manjahlega di Kecamatan Rancasari;</p> <p>g. Kelurahan Cibangkong di Kecamatan Batununggal;</p> <p>h. Kelurahan Kebon Jayanti di Kecamatan Kiaracondong;</p> <p>i. Kelurahan Kujangsari di Kecamatan Bandung Kidul;</p> <p>j. Kelurahan Cijawura di Kecamatan Buahbatu;</p> <p>k. Kelurahan Babakan Ciparay dan Kelurahan Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay;</p> <p>l. Kelurahan Cijerah, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondewah Rahayu, dan Kelurahan Warung Muncang di Kecamatan Bandung Kulor;</p> <p>m. Kelurahan Kopo di Kecamatan Bojongsia Kaler;</p> <p>n. Lokasi Sadang Serang, Simpang Dago dan Bagus Rangin di Kecamatan Coblong;</p> <p>o. Lokasi Arjuna dan Jatayu Molek di Kecamatan Cicendo;</p> <p>p. Lokasi Tamansari di Kecamatan Bandung Wetan;</p> <p>q. Lokasi Nyengseret di Kecamatan Astananyar; dan</p> <p>r. Lokasi Cingised di Kecamatan Arcamanik.</p>					
e.	Perwujudan KSK PPK Alun-alun						
	Penyusunan RTBL kawasan		APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Penyusunan panduan pelestarian kawasan dan bangunan		APBD Kota	OPD Penataan Ruang OPD Perumahan/ Permukiman			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial	PPK Alun-alun	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Perumahan/Permukiman			
	Penataan pedagang kaki lima	PPK Alun-alun	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan RTH	PPK Alun-alun	APBD Provinsi/Kota	OPD Penataan Ruang			
	Pelestarian bangunan cagar budaya	PPK Alun-alun	APBD Kota	OPD Pariwisata			
	Pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK	PPK Alun-alun	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
f.	Perwujudan KSK PPK Gedebage						
	Penyusunan RTBL kawasan	PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota	PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK	PPK Gedebage	APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Pekerjaan Umum			
	Pembangunan kawasan Perumahan baru dengan konsep hunian berimbang	PPK Gedebage	APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Pembangunan Perumahan susun sedang dan tinggi	PPK Gedebage	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan fasilitas olah raga berskala kota	PPK Gedebage	APBD Kota	OPD Pemuda dan Olah Raga, OPD Penataan Ruang			
	Pengembangan danau buatan	PPK Gedebage	APBD Provinsi/Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum			
	Pembangunan RTH	PPK Gedebage	APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang			
g.	Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut						

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan	Cibaduyut	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM, OPD Lingkungan Hidup			
	Penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha	Cibaduyut	APBD Kota	OPD Perindustrian			
	Pengembangan fasilitas parkir bersama	Cibaduyut	APBD Provinsi/Kota	OPD Perhubungan			
	Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman	Cibaduyut	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum, OPD Perumahan/Permukiman			
	Pengembangan pusat perdagangan dan promosi	Cibaduyut	APBD Provinsi/Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Perindustrian			
h.	Perwujudan KSK sentra bonoka Sukamulya						
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan	Sukamulya	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM, OPD Lingkungan Hidup			
	Pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri	Sukamulya	APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perindustrian			
	Pengembangan pusat perdagangan dan promosi	Sukamulya	APBD Provinsi/Kota	OPD Perindustrian			
	Penyediaan fasilitas parkir bersama	Sukamulya	APBD Provinsi/Kota	OPD Perhubungan			
i.	Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati						
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan	Binongjati	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Permukiman, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM,			

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023
	Penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan	Binongjati	APBD Provinsi/Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Perindustrian		
	Pembangunan pusat perdagangan dan promosi	Binongjati	APBD Provinsi/Kota	OPD Perindustrian		
j.	Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah					
	Penataan kawasan	Cigondewah	APBD Kota	OPD Penataan Ruang,		
	Pembangunan jalan akses menuju kawasan	Cigondewah	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum		
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan	Cigondewah	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Perumahan, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM,		
	Pembangunan fasilitas parkir bersama	Cigondewah	APBD Provinsi/Kota	OPD Lingkungan Hidup		
	Pembangunan pusat perdagangan dan promosi	Cigondewah	APBD Provinsi/Kota	OPD Perhubungan		
k.	Perwujudan KSK sentra kaos Surapati					
	Pembangunan pusat perdagangan dan promosi	Surapati	APBD Provinsi/Kota	OPD Perindustrian		
	Perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha	Surapati	APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perindustrian		
	Pengembangan jalan akses menuju kawasan	Surapati	APBD Provinsi/Kota	OPD Pekerjaan Umum		
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan	Surapati	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Perumahan, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM,		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN		
					2022	2023	2024
l.	Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas Penyusunan RT/BL kawasan Penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki Penataan pedagang kaki lima Penataan fasad bangunan Pembangunan fasilitas parkir bersama Konsolidasi lahan komersial dan perumahan	Cihampelas	APBD Kota	OPD Penataan Ruang			
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD Kota		
					APBD Kota		
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD Kota		
					APBD Kota		
m.	Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu Pembangunan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan Pembangunan jalan akses menuju kawasan Pembangunan pusat perdagangan dan promosi Perbaikan infrastruktur dan unit usaha	Cibuntu	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/Perumahan, OPD Penataan Ruang, OPD Pekerjaan Umum, PDAM, OPD Lingkungan Hidup OPD Pekerjaan Umum			
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD Kota		
					APBD		
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD Kota		
					APBD		
n.	Perwujudan KSK Babakan Siliwangi Pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi Pembangunan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan kebun binatang Bandung	Babakan Siliwangi	APBD Provinsi/Kota APBD Provinsi/Kota APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Lingkungan Hidup OPD Pariwisata OPD Lingkungan Hidup			
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD		
					APBD Provinsi/Kota		
					APBD		

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN	
					2022	2023 2024
	Penyediaan fasilitas parkir terpadu	Babakan Siliwangi	APBD Provinsi/Kota	OPD Perhubungan		
	Pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan	Babakan Siliwangi	APBD Kota	OPD Penataan Ruang, OPD Lingkungan Hidup		
o.	Perwujudan KSK Puncut;					
	Pengendalian pembangunan kawasan terbangun	Puncut	APBD Kota	OPD Penataan Ruang		
	Pengembangan kegiatan wisata alam terbatas	Puncut	APBD Provinsi/Kota	OPD Pariwisata, OPD Lingkungan Hidup		
	Rehabilitasi lahan kritis	Puncut	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Lingkungan Hidup		
	Pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun	Puncut	APBN, APBD Provinsi/Kota	OPD Penataan Ruang		
p.	Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh					
	Penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh	Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan/ Permukiman, OPD Perencanaan Kota		
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh	Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan/ Permukiman		
	Penataan dan revitalisasi kawasan	Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi/Kota	OPD Perumahan/ Permukiman		
	Pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh	Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi/Kota, Swasta	OPD Perumahan/ Permukiman		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



WALI KOTA BANDUNG

ttd

YANA MULYANA